

**EVALUASI STRATEGI PENYELENGGARA PEMILU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA
DI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2015
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan)**

(Skripsi)

Oleh

SITI MUSLIMAH



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN LMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRACT

STRATEGY EVALUATION OF INCREASING THE NUMBER OF PARTICIPANTS FOR BEGINNER VOTER IN LOCAL LEADERS ELECTION 2015 IN WAY KANAN

By

SITI MUSLIMAH

The Strategies which were done by General Elections Commission (KPU) of Way Kanan in increasing the participation of beginner voter on Local Leaders Election in 2015. Referred to General Elections Commission Regulation Number 5 on year 2015 about people socialization and participation on Governor and Vice Governor Elections, Regent and Vice Regent Elections, and/or Mayor and Vice Mayor Elections.

This research was the about strategy of KPU Way Kanan and supporting and obstacle factors which faced by KPU in increasing the participation of beginner voter. The goal of this research were analyze the strategy of General Elections Commission also obstacles which faced by KPU of Way Kanan finding in increasing the participation of beginner voter. The type of this research descriptive using qualitative approach. this research was focussed on evaluation process, relation between strategy formulation also strategy implementation using Crown Dirgantoro Theory. Data collection techniques consisted to interview and documentation.

The result of this research showed the that strategy of KPU in increasing the participation of beginner voter in Way Kanan was successfull. Could be seen from the number of participation which increased from 60% on year before became 80%. Although the participation had increased but there were some obstacles such us the accuracy of Final Voter List (DPT) which was not good, less socialization, and passive people. Suggestion that could be given: (1) KPU should maximize Final Voter List which were not accurate by checking the voter door to door; (2) KPU should to maximize the socialization especially in date location; (3) The voters should be active on updating the selection issue and ensure themselves registered on Final Voter List.

Keywords: Strategic Management, Strategy Evaluation, People Participation, General Election

ABSTRAK

EVALUASI STRATEGI PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2015 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan)

OLEH

SITI MUSLIMAH

Strategi merupakan cara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015. Adapun teknis pelaksanaannya merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Penelitian ini membahas mengenai strategi KPU Kabupaten Way Kanan dan faktor penghambat serta pendukung yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis strategi KPU dan kendala apa saja yang dihadapi KPU Way Kanan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah proses evaluasi, hubungan formulasi dan implementasi strategi menggunakan teori Crown Dirgantoro. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Way Kanan telah berhasil. Di lihat dari angka partisipasi dari tahun sebelumnya 60% menjadi 80%. Meskipun partisipasi meningkat terdapat faktor penghambat yaitu akurasi DPT kurang baik, sosialisasi kurang maksimal, masyarakat yang pasif. Adapun saran peneliti yaitu : (1) KPU lebih memaksimalkan DPT yang kurang akurat dengan melakukan pencoklikan pemilih dari rumah ke rumah; (2) KPU lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi akar rumput pemilih terlebih di tempat pedalaman; (3) Harus aktif memastikan daftar dalam DPT.

Kata Kunci : Manajemen Strategi, Evaluasi Strategi, Partisipasi Masyarakat, Pemilihan Umum

**EVALUASI STRATEGI PENYELENGGARA PEMILU DALAM
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA
DI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2015
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan)**

Oleh

Siti Muslimah

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Skripsi : **EVALUASI STRATEGI PENYELENGGARA
PEMILU DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI PEMILU PEMULA DI PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH 2015
(Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Way Kanan)**

Nama Mahasiswa : **Siti Muslimah**

No. Pokok Mahasiswa : 1216041100

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.
NIP 19780923 200312 1 001

Devi Yulianti, S.A.N., M.A.
NIP 19850705 200812 2 004

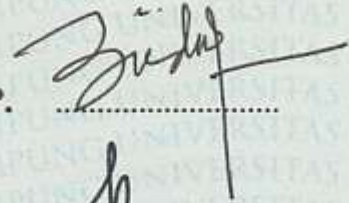
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

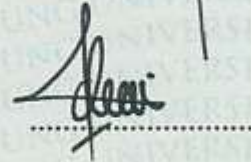
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.A.P.**



Sekretaris : **Devi Yulianti, S.A.N., M.A.**



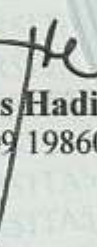
Penguji Utama : **Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si.
NIP. 19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **06 September 2016**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 06 September 2016

ng membuat pernyataan,



Siti Muslimah

NPM. 1216041100

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Gedung Makripat pada tanggal 12 Maret 1994. Penulis merupakan anak terakhir dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Jamikun dan Ibu Najibah. Penulis menempuh pendidikan formal di SD Negeri 1 Gedung Makripat dan menyelesaikan studinya pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2009 dan setelah itu melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah yaitu SMA Negeri 2 Kotabumi yang selesai pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur PMPAP pada Tahun 2012. Pada Januari Tahun 2015 penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Way Tuba Kecamatan Gunung Labuhan.

Selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, penulis pernah mengikuti organisasi internal kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Anggota Bidang Dana dan Usaha (Danus), Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI) sebagai Anggota

Bidang Kaderisasi, UKM Birohmah sebagai Kepala Divisi Kaderisasi
Kemuslimahan, dan BEM U KBM Unila sebagai Asisten Menteri Hukum
Advokasi dan Perundang-undangan (HAN)

MOTTO

*Jadilah kamu manusia yang pada
kelahiranmu semua orang tertawa bahagia,
tetapi hanya kamu yang menangis; dan pada
kematianmu semua orang menangis sedih,
tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.*

(Mahatma Ghandi)

*Dan katakanlah : Ya Tuhanku, tambahkanlah
kepadaku ilmu pengetahuan*

(Q.S. Thaha : 114)

*Berdiri di antara orang-orang yang duduk
(Siti Muslimah)*

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Ini Kepada

*Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan
Rahmat dan Hidayah kepada seluruh umatnya*

*Ibu Najibah dan Bapak Alm. Jamikun Tercinta,
terimakasih atas doa'a, kasih sayang serta pengorbanan
selama ini, yang telah mendidik dengan penuh
kesabaran, dan selalu memberikan semangat sehingga
dapat menyelesaikan karya ini.*

*Kakak-kakak ku tersayang M. Deris, Leni Marlina,
Mulyadi, Ayub, Harani, Sakdun Naim, Marelita
Devisa yang telah mendidik dan selalu memberikan
semangat setiap harinya.*

*Almamater tercinta
UNIVERSITAS LAMPUNG*

SANWACANA

Bismillahirrohmanirohim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang diakhiri dengan penulisan skripsi. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Strategi Penyelenggara Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Pemilihan Umum Kepala Daerah 2015 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan) adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara di Universitas Lampung.

Penulis menyadari banyak kesulitan yang dihadapi dari awal pengerjaan hingga penyelesaian skripsi ini, namun berkat bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, terutama dosen pembimbing, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP. selaku dosen pembimbing skripsi utama yang telah banyak membantu dan bersedia membimbing, mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih banyak pak, semoga

keikhlasan dan ketulusan Bapak dalam mendidik mendapatkan keberkahan dari Allah SWT.

2. Ibu Devi Yulianti, S.A.N., M.A. selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta saran-saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji sekaligus Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan banyak masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.PA selaku sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terima kasih pak sudah meyetujui *outline* yang penulis ajukan sebagai tonggak awal bagi penulis dalam mengawali skripsi ini.
5. Bapak Dr. Noverman Duadji M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan saran dan masukan selama menjalani masa perkuliahan.
6. Seluruh staf pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Lampung yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan pengetahuan. Trimakasih kepada Pak Bambang Utoyo, Pak Syamsul Maarif, Pak Fery Triadmojo, Bu Meiliyana, Pak Izul, Bu Novita Tresiana, Bu Dewie Brima Atika, Bu Selvi, Bu Dian Kagungan, Bu Indriyanti, Bu Intan, Bu Ani Agus Puspawati.

7. Seluruh Pihak Informan dan Pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan yang telah memberikan izin penelitian sehingga penulis dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Gadis-gadis sholehaku yang sudah setia menemani perjalanan semasa kuliah. Herlina si gadis yang super duper santai dan hidupnya gak berjadwal, tapi selalu setia mendengarkan curhatanku dalam waktu apapun. Melisa Mandasari si gadis yang selalu peka dengan situasi dan selalu gupek kalo ada masalah kecil, tapi dia sebenarnya punya rasa care yang luar biasa. Merita Rahma si gadis cerdas yang cerewet sukanya makan, dan shopping tapi asik kalo di ajak diskusi. Suci Lestari si gadis baik hati yang kalem dan selalu mengalah. Dewi Kartika Rini si gadis baik dan sering galau. Terimakasih atas persahabatan ini semoga bisa selalu terjaga.
9. Lelaki-lelaki super yang sudah setia menemani dikala mengerjakan tugas. Nadiril si lelaki kardus tapi baik hati. Ariswan Barmawi si lelaki yang penuh dengan keceriaan. Muhammad Eko si lelaki yang cerdas dan tidak sombong. Sholeh si lelaki yang baik dan ramah. Johan Syah si lelaki yang selalu memikirkan penampilan. Ikhwan si lelaki yang dewasa dan penuh solusi.
10. Seluruh Keluarga Administrasi Negara (Ampera) Infantri, Guruh, Novi, Erna, Anisa, Rida, Ria, Antonia, Fitri, Firda, Yuyun, Andre, Fajar, Topik, Putu, Mamat, Rifki Cibi, Bery, Rezki, Alan, Ayu, Maya, Yogi, Irlan, Kiki, Akbar, Satria, Azizah, Novaria, Anisa R, Dian, Purnama, Sela, Ayu Sanita, Emi, Aliza, Yoanita, Endry, Rifki Nyum, Ikhsan, Quma, Firdaus, Hamdani, Alex, Yuli, Ana, Putri Pewe, Frisca, Serli, Anggi, Dara, Mona, Oliva, Stefani, Ali, dan teman-teman yang lainnya, terimakasih atas bantuan, dukungan, dan

kebersamaannya selama ini dari teman-teman semua , saya sangat bersyukur mengenal kalian semua. Semoga kesuksesan selalu bersama kita. Semangat terus Ampera.

11. Keluarga DIERY di SMANDA Kobum yang udah menemani kegilaan sewaktu di SMA. Yossi, Ayu, Fita, Dindi, Susi, Angga, Dian, Darman, Dion, Tyson, Fidri, Mamat, Galih, Ari, Oman, Andre, Dion, Yuda, Puji, Lidya, Nunung, Tata, Dika, Fera, Tri, Nanda. Terimakasih sudah membuat warna sewaktu disekolah.
12. Teman-teman KKN di Desa Way Tuba Kecamatan Gunung Labuhan periode Januari-Februari 2015. Kak Anjar, Kak Zein, Kak Akbar, Riky, Gilang, Adnan, Farid, Almira, MbK Galuh, Mbak Pit, Mutiara, Sunarti, Manda terimakasih telah menjadi bagian dalam menjalankan progja-progja selama KKN berlangsung, serta terimakasih kepada Pak Carik, Pak Adin, Mak Adin, Pak Alom, Om dan Tante serta keluarga besar di Way Tuba yang lain.
13. Tim Fokus yang sudah menjadi bagian dari saudara selama di kampus, Andi Wirman, Rijal, Salam, Egi Wiragala, Ahmad Nur, Anwar, Devi, Lina, Heni, Parastry jaga terus semangat buat masa depan kita.
14. Keluarga besar BEM U KBM Unila Kabinet Muda Bergerak, Kak Bambang, Kak Deni, MbK Naila, Nindri, Heni, Ari, Kak Alek, Chan, Nadiril, Huda, Deris, Riska, Kak Anggi, MbK Sun, Kak Irkham, Sri, Kak Ogi, Novi, Kak Beny, Nina, MbK Ayu, MbK Marel dan spesial buat kementerian Hukum Advokasi dan Perundang-undangan (HAN) Rijal, terimakasih atas kerjasamanya di kementerian ini dan kepada adik Machfud, Hani, Ida, Febri,

Galih, Ganjar, Lova, Roberto yang sudah semangat dalam mensukseskan progja dikementrian HAN.

15. Keluarga PACETERS yang udah menemani keseruan berpetualang di alam, Kak Anggi, Kak Edi, Kak Ali, Kak Aji, Kak Febri, Kak Fiskan, Ijal, Ical, MbK Marel, Sri, Heni, Elin, Lia, Mega. Terimakasih sudah menjadi orang yang apa adanya ketika mendaki sampai ke puncak.
16. Kosan Pondok Ratu yang telah menampung saya selama kuliah, Mas Dodi, Yeni Kartini, Try Larasati, MbK Dona, MbK Yule, MbK Ica, Dewi, Azizah, Rani, Melda, Ayu, Nila, Eli, Vina dll. Terimakasih atas kebersamaannya selama dikosan.
17. Abang-abang luar biasa yang udah nyemangatin sampai sekarang, Bang Hendra (Batin sai nayah cawo) orangnya luar biasa cerdas dan suka mengkritik. Bang Erwan si orang Batak yang katanya kerja jadi kuli buat beli Pajero. Bang Guntur si pria cerdas pemecah telur yang udah duluan Nikah dari abang yang lain. Terimakasih atas persahabatan ini semoga kelak kita sukses semua.
18. Serta rekan-rekan yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, terima kasih sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang bisa penulis berikan.

Karya tulis ini adalah karya terbaik yang pernah peneliti tulis dengan mencurahkan seluruh pemikiran, perasaan, dan tenaga. Namun sebagai peneliti

menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, 06 September 2016
Penulis

Siti Muslimah

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi	12
1. Konsep Manajemen Strategi	12
a. Strategi	12
b. Manajemen Strategi	15
2. Manfaat Manajemen Strategi	16
3. Proses dalam Manajemen Strategi	17
a. Formulasi Strategi	17
b. Implementasi Strategi	17
c. Evaluasi Strategi	26
4. Dimensi – dimensi Strategi	31
5. Tipe- tipe Strategi	32
6. Analisis Lingkungan dalam Manajemen Strategi	34
a. Lingkungan Internal	36
b. Lingkungan Eksternal	39
B. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat	40
1. Pengertian Partisipasi Masyarakat	40
2. Partisipasi Politik	44
3. Fungsi Partisipasi Politik	47
4. Bentuk Partisipasi Masyarakat	48
C. Tinjauan Tentang Pemilu	50
1. Pengertian Pemilu	50
2. Macam – macam Pemilu	52
3. Tujuan Pemilu	54
4. Fungsi Pemilu	54
5. Sistem Pemilu	56
D. Kerangka Pemikiran	58

III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Tipe Penelitian	62
B. Fokus Masalah	63
C. Lokasi Penelitian.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data.....	67
E. Teknik Analisis Data.....	69
F. Teknik Keabsahan Data	72
IV GAMBARAN UMUM	
A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan.....	76
1. Sejarah Singkat KPU Kabupaten Way Kanan	76
2. Visi Misi.....	81
3. Tugas dan Wewenang	82
4. Kelembagaan KPU Kabupaten Way Kanan	83
5. Tupoksi KPU Kabupaten Way Kanan	86
V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	90
1. Strategi Penyelenggara Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada 2015	90
2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.....	110
B. Pembahasan	120
1. Strategi Penyelenggara Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Pilkada 2015	121
2. Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula.....	129
VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

	Halaman
1. Proyeksi Tahapan Pilkada Serentak	2
2. Partisipasi Pilkada Kabupaten Way Kanan	6
3. Perbedaan Formulasi dengan Implementasi Strategi	25
4. Daftar Informan.....	68
5. Contoh Triangulasi Strategi KPU Kabupaten Way Kanan	73
6. Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR	79
7. Data Pemilih Tetap Pilkada 2015 Kabupaten Way Kanan	86
8. Penetapan Relawan Demokrasi KPU Way Kanan.....	93
9. Anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan Tahun 2015-2016	117
10. Tahapan Pencairan Dana Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan	118

DAFTAR GAMBAR

Gambar

	Halaman
1. Hubungan Formulasi Strategi dengan Implementasi Strategi.....	24
2. Model Kerangka Pemikiran	61
3. Struktur Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun.....	84
4. SK Penetapan Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Way Kanan	92
5. Foto Bersama Relawan Demokrasi.....	94
6. Sosialisasi KPU <i>Goes To School</i>	96
7. Pelaksanaan Pemilos Pondok Pesantren Kasui	97
8. Pelaksanaan Pemils SMAN 2 Kasui	98
9. Persiapan Pelaksanaan Persami	101

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali yang dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1 bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi di mana rakyat secara langsung dilibatkan dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun ke depan. Pada saat ini, pemilu secara nasional dilakukan dua kali yaitu pemilihan anggota legislatif (Pileg), yang merupakan rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif, baik anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Di samping itu, diselenggarakan pula pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung oleh rakyat sesudah pemilihan anggota

legislatif dilaksanakan. Selain itu terdapat pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan di daerah-daerah yang ada di provinsi masing-masing daerah

Pemilu kepala daerah langsung dalam hal ini pertama kalinya dilaksanakan pada Juni 2004. Pada akhir Tahun 2015 ini, untuk pertama kalinya pilkada serentak dilaksanakan. Akhir 2015 adalah gelombang pertama pilkada serentak, yang beberapa diantaranya adalah daerah otonom baru. Pilkada serentak gelombang kedua direncanakan berlangsung Februari 2017, sedangkan gelombang ketiga dijadwalkan pada Juni 2018. Berikut ini adalah tabel yang berisi tahapan pilkada serentak yang ada di seluruh Indonesia.

Tabel 1. Proyeksi Tahapan Pilkada Serentak

No	Tahun	Daerah	Masa Jabatan
1.	Pilkada 2015	204 Daerah	5 Tahun
2.	Pilkada 2016	100 Daerah	(285 pilkada serentak tahun 2018) 2 Tahun
3.	Pilkada 2017	67 Daerah (Penjabat s.d 2018)	
4.	Pilkada 2018	118 Daerah	
5.	Pilkada 2019	52 Daerah	Diisi oleh pejabat KDH sampai Tahun 2020
6.	Pilkada 2020	541 Daerah	5 Tahun

Sumber: Data Komisi Pemilihan Umum RI Tahun 2015

Tabel proyeksi tahapan pilkada serentak diatas menunjukkan bahwasanya pelaksanaan pesta demokrasi akan dilaksanakan lima tahun kedepan. Proyeksi tahapan tersebut juga menunjukkan bahwasannya akan terjadi pilkada serentak yang sama pada tahun 2020 mendatang. Adanya pilkada serentak merupakan suatu wujud pesta demokrasi yang dirasakan oleh berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Tolak ukur dalam pelaksanaan pemilu terdapat pada tinggi atau rendahnya partisipasi masyarakat di suatu daerah. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat, yang memerlukan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan.

Partisipasi pemilih dalam pesta demokrasi tingkat lokal cenderung mengalami pasang surut rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat dilihat dalam sikap Golongan Putih (golput) dalam pemilu. Maksud dari golput di sini adalah fenomena dalam demokrasi. Dalam perkembangannya, keputusan untuk tidak memilih ternyata terdapat berbagai faktor didalamnya, dalam perspektif berdemokrasi, tentunya sikap golput akan berimplikasi pada pembangunan kualitas demokrasi. Di mana satu suara sudah bisa menentukan perolehan suara akhir dalam pemilu. maka dari itu golput tidaklah dianjurkan oleh pemerintah.

Adanya pemilu maka menunjukkan bahwa kita telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintah secara aman, damai dan tertib. serta harus bisa berkomitmen untuk memilih calon pemimpin tanpa adanya niatan akan golput. Dalam hal ini daerah yang juga ikut melaksanakan pilkada serentak di Tahun 2015 adalah Lampung. Lampung merupakan daerah yang ikut meramaikan pesta

demokrasi dengan cakupan pemilihan dikabupaten/kota. Adapun kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak ini yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesawaran, Lampung Selatan, Pesisir Barat dan Way Kanan.

Keikutsertaan Lampung dalam melaksanakan Pilkada Serentak ini menunjukkan bahwa akan adanya pergantian kepala daerah di delapan kabupaten/kota tersebut. Jumlah total pemilih tetap pada pilkada serentak tahun 2015 Pada pemilih tetap yang ada di Lampung berdasarkan tabel di atas yaitu mencapai 4.024.760 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa banyaknya peserta pemilu pada pilkada serentak diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih pada saat pencoblosan. Meskipun dalam pelaksanaannya, banyak sekali masalah-masalah yang ada di dalamnya. Diantaranya yaitu partisipasi masyarakat yang selalu mengalami pasang surut. sudah dijelaskan bahwasannya penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan umum nasional yang diikuti penurunan partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah akan menjadi berita buruk bagi partai politik, terutama bagi kehidupan demokrasi Indonesia yang sedang berkembang.

Fenomena penurunan partisipasi tersebut juga terdapat di Daerah Lampung seperti Way Kanan. Way Kanan adalah Kabupaten yang mengalami terjadinya pasang surut pada partisipasi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Erwan Bustomi S. H, M.H selaku Anggota Komisioner KPU Way Kanan yang menyatakan bahwa pada pemilihan umum Legislatif 2014 tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 75,6% sedangkan pemilihan umum Eksekutif mencapai angka 72,65%. Angka

partisipasi tersebut terbilang menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 78% partisipasi masyarakat yang ikut merayakan pemilu. Terlebih lagi ketika pilkada serentak telah dilaksanakan pada 9 Desember 2015 lalu yang menunjukkan perolehan perhitungan di angka yang hanya mencapai 68,65%. (*sumber: KPU Way Kanan*)

	NAMA PASANGAN CALON	RINCIAN															
I	RINCIAN PROSENTASE PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	B A H U G A	B A N J I T	B A R A D A T U	B L A M B A N G A N U M P U	B U A Y B A H U G A	B U M I A G U N G	G U N U N G L A B U H A N	K A S U I	N E G A R A B A T I N	N E G E R I A G U N G	N E G E R I B E S A R	P A K U A N R A T U	R E B A N G T A N G K A S	W A Y T U B A	J U M L A H A K H I R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	H. Bustami Zainudin, S.Pd., MH dan Adinata	5188	3288	4145	3480	3277	3034	3985	5981	4822	4420	3900	4175	4228	4392	4339	4024
2	H. Raden Adipati Surya, SH., MM dan DR. Drs. H. Edward Antony, MM	4882	6712	5850	6520	6773	6966	6015	4011	5536	5680	6005	5825	5781	6661	6761	5976
II	PARTISIPASI PEMILIH	7832	6733	7115	7334	7431	7411	6418	6435	6443	7436	6366	6668	6880	7158	7565	6855

Angka yang menunjukkan belum maksimalnya partisipasi pemilih dalam pemilu di atas akan berdampak pada keberlangsungan pembangunan suatu daerah yang melibatkan masyarakat. Terlebih lagi keterlibatan pemuda di dalamnya. Karena pemuda merupakan agen perubahan suatu bangsa yang dapat menjadi penentu atas keberlangsungan suatu pembangunan negara. Melihat penurunan partisipasi tersebut, maka perlu adanya upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula dalam pemilu.

Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini haruslah menggunakan strategi yang benar-benar bisa membuat peningkatan pada lingkup partisipasi. Strategi adalah salah satu hal penting karena memberikan landasan untuk mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Strategi memiliki peran dalam setiap pengambilan keputusan. Strategi memberikan pilihan tentang apa yang perlu dilakukan dan tidak perlu dilakukan. Makna strategi yaitu ketika seseorang atau organisasi memutuskan apa yang seharusnya dikerjakan, itulah yang dimaksud dengan strategi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Drucker dalam Akdon (2011:4) bahwa strategi adalah mengerjakan sesuatu yang benar (*doing the right things*). Strategi inilah yang sangat dibutuhkan KPU dimana dalam strategi kita harus menggunakan manajemen khusus di dalamnya. Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula.

Heene, dkk (2010:76) mengartikan manajemen strategi adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan semua kegiatan dan fungsi yang ada pada organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda

strategik dari organisasi tersebut. Tujuan dari manajemen itu sendiri adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi. Dalam hal ini, manajemen strategi sangatlah diperlukan dimana dalam pelaksanaannya KPU Way Kanan telah berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi. Pelaksanaan pesta demokrasi tersebut akan berjalan dengan lancar jika proses perencanaan manajemen strategi berjalan dengan lancar juga.

Bagi pemilih pemula, pesta demokrasi ini adalah momen terbaik. karena pemilih pemula sudah diberi kebebasan dalam memilih calon kepala daerah yang diinginkan dengan cara ikut serta dalam pencoblosan. Untuk itu, pemilih pemula harusnya diberi pembekalan terlebih dahulu mengenai apa itu pemilu dengan cara pendidikan politik dan sebagainya. Pencerdasan dalam politik inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi KPU daerah Way Kanan yang merupakan salah satu pihak penyelenggara pilkada serentak di tahun 2015 KPU Way Kanan telah menjalankan berbagai macam strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula. Strategi yang dilakukan oleh KPU Way Kanan yaitu: (1) Membentuk relawan demokrasi, (2) KPU *goes to school*, (3) PEMILOS (pemilihan langsung osis), (4) PERSAMI (Perkemahan Pramuka Sabtu Malam Minggu). Strategi yang telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh KPU Way Kanan tersebut, dapat menumbuhkan dan memberikan ruang bagi masyarakat agar secara aktif terlibat dalam setiap tahapan hingga pelantikan calon terpilih.

Implementasi strategi haruslah dijalankan dengan baik, karena implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat

menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi.

Seperti yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota merupakan wujud dari proses bagaimana formulasi dan implementasi dijalankan. Hal tersebutlah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai ***“EVALUASI STRATEGI PENYELENGGARA PEMILU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA DI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2015 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Way Kanan)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah strategi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah 2015 di Way Kanan?

2. Apasajakah faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di pemilihan kepala daerah 2015 Way Kanan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan-tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menggambarkan proses strategi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di pemilihan kepala daerah 2015 Way Kanan.
2. Untuk menganalisis kendala dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di pemilihan kepala daerah 2015 Way Kanan.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan informasi untuk melakukan kajian/penelitian lebih lanjut tentang Manajemen Strategi ataupun berkaitan dengan masalah lain.

2. Manfaat Praktis

Dapat menjadi masukan atau bahan informasi bagi peneliti atau mahasiswa yang ingin mendalami studi tentang strategi serta bermanfaat bagi KPU Way Kanan untuk bahan evaluasi dan perbaikan. Serta dapat menjadi masukan bagi

pemilih pemula yang akan memilih dengan mengetahui pendidikan politik sejak dini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Manajemen Strategi

1. Konsep Manajemen Strategi

a. Strategi

Secara etimologi kata strategi menurut Bracker dalam Heene, dkk (2010:53) berasal dari bahasa Yunani Klasik, yakni “*strategos*” (Jendral), yang pada dasarnya diambil dari pilihan kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja Yunani yang berhubungan dengan “*strategos*” ini dapat diartikan sebagai perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki. Strategi adalah salah satu hal yang penting kerana memberikan landasan mencapai suatu tujuan dalam berbagai bentuk. Strategi mempunyai peran yang sangat besar, dimana strategi digunakan untuk mengambil suatu keputusan tentang apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan.

Strategi menurut Nawawi (2012:147), dari sudut etimologis berarti penggunaan kata “strategik” dalam manajemen sebuah organisasi, dapat diartikan sebagai kiat, cara, taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi

manajemen, yang terarah pada tujuan strategik organisasi. Sedangkan menurut Chandler dalam Akdon (2011:12) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan organisasi dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu pilihan atau jalan yang tidak hanya sekedar mencapai suatu tujuan akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam lingkungan hidup dimana suatu organisasi sedang menjalankan aktivitasnya.

Menurut Crown Dirgantoro (2001: 5) menyatakan definisi strategi sebagai hal yang menetapkan arah kepada manajemen dalam arti orang tentang sumber daya dalam bisnis dan tentang bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan persaingan dalam pasar. Dalam hal ini, strategi dapat diartikan menyeluruh yang meliputi semua aspek yang penting dalam suatu organisasi.

Menurut Akdon (2009:12) pada dasarnya yang dimaksud strategi bagi suatu manajemen organisasi adalah rencana besar yang berorientasi pada jangka panjang yang jauh ke masa depan serta menetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan tersebut, maka strategi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya;
2. Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal;
3. Pola arus dinamis yang ditetapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan yang dipilih oleh organisasi.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Vancil dalam Akdon (2009:13), strategi adalah sebuah organisasi atau sub unit sebuah organisasi lebih besar yaitu sebuah konseptualisasi yang dinyatakan atau yang diimplikasi oleh pemimpin organisasi yang bersangkutan, berupa:

- a. Sasaran-sasaran jangka panjang atau tujuan-tujuan organisasi tersebut;
- b. Kendala-kendala luas dan kebijakan-kebijakan, atau yang ditetapkan sendiri oleh sang pemimpin yang diterimanya dari pihak atasannya, yang membatasi aktivitas-aktivitas yang bersangkutan;
- c. Kelompok rencana-rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek yang telah ditetapkan dengan berharap diberikannya sumbangsih mereka dalam hal mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut.

Berdasarkan pengertian di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa strategi adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh individu ataupun kelompok organisasi yang memiliki suatu tujuan yang berstruktur dan terarah. Strategi dalam hal ini merupakan bagian terpadu dari suatu rencana (*plan*), rencana merupakan produk dari perencanaan (*planning*) yang merupakan fungsi dasar proses manajemen. Selain itu,

strategi dapat menjadi alat yang bisa menentukan langkah organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Manajemen Strategi

Wheelen dan Hunger dalam Umar (2010:16) manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen strategi meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian. Selain itu juga definisi yang lebih khusus, misalnya dua pakar strategi, Hamel dan Prahalad dalam Umar (2010:17) yang mengangkat kompetensi inti sebagai hal penting. Definisi strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.

Manajemen memiliki pengertian yang sangat banyak, baik secara teoritis maupun dalam praktek manajemennya. Heene, dkk (2010:76) mengartikan manajemen strategi adalah suatu proses manajemen puncak yang mengelompokkan dan mengorientasikan semua kegiatan dan fungsi yang ada pada organisasi serta terfokus untuk diaktualisasikannya agenda strategik dari organisasi tersebut. Tujuan dari manajemen itu sendiri adalah untuk menciptakan efektivitas jangka panjang organisasi. Dengan demikian, manajemen organisasi mengintegrasikan semua proses manajemen lainnya dengan tujuan mengembangkan diri berdasarkan pendekatan

yang sistematis, rasional, dan efektif dalam menentukan tujuan dari organisasi, kemudian mengaktualisasikan, memantau dan mengevaluasinya.

2. Manfaat Manajemen Strategi

Salusu (2008:495) menyebutkan beberapa manfaat pentingnya manajemen strategis, yakni:

- a. Identifikasi peluang, yakni memungkinkan ancaman dari lingkungan dapat di hindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi, sehingga organisasi dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya dan memberi petunjuk untuk mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal;
- b. Semangat korps, yakni mampu menciptakan sinergi dan semangat korps sehingga meningkatkan produktivitas;
- c. Perubahan-perubahan strategis, yakni apabila terjadi perubahan dalam lingkungan organisasi maka dengan manajemen stratejik dapat menyesuaikan arah perjalanan organisasi dengan misi dan tujuan yang dicapai.

3. Proses dalam Manajemen Strategis

Proses manajemen strategis menurut Dirgantoro (2001: 94) terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Formulasi Strategi

Mencakup kegiatan mengembangkan visi dan misi organisasi, mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menemukan kekuatan dan kelemahan internal organisasi, menetapkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi dan memilih strategi tertentu untuk digunakan. Isu-isu perumusan strategi mencakup keputusan mengenai bisnis baru yang akan dimasuki, bisnis yang akan di tinggalkan, pengalokasian sumber daya, perluasan operasi atau diverifikasi, keputusan untuk memasuki pasar internasional, merger atau membentuk usaha patungan, dan cara untuk menghindari pengambilalihan oleh pesaing bisnis.

b. Implementasi Strategi

Mengharuskan organisasi untuk menetapkan sasaran, membuat kebijakan, motivasi karyawan dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi dapat dilaksanakan. Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang mendukung strategi, penciptaan struktur organisasi yang efektif, mengalokasikan sumber daya, pengarahan kembali usaha-usaha pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi, serta menghubungkan kompensasi untuk karyawan dengan kinerja organisasi. Pelaksanaan strategi sering disebut tahap tindakan dalam manajemen strategi. Melaksanakan strategi untuk melaksanakan

strategi-strategi yang dirumuskan. Pelaksanaan strategi yang sering dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam manajemen strategi menuntut disiplin, komitmen dan pengorbanan pribadi. Keberhasilan pelaksanaan strategi tergantung pada kemampuan manajer untuk memotivasi para karyawan. Hal ini lebih merupakan seni daripada ilmu. Strategi-strategi yang dirumuskan tetapi tidak dilaksanakan tidak akan memberikan manfaat.

Implementasi sebagai suatu konsep tindak lanjut pelaksanaan kegiatan yang cukup menarik untuk dikaji oleh cabang ilmu. Hal ini semakin mendorong perkembangan konsep implementasi itu sendiri dan juga menyadari bahwa dalam mempelajari implementasi sebagai suatu konsep akan dapat memberikan kemajuan dalam upaya pencapaian tujuan. Implementasi strategi merupakan salah satu bagian terpenting dari proses strategi dan sepatutnya memperoleh perhatian sama seperti ketika proses memformulasikannya. Dalam menjalankan proses implementasi, para manajer wajib melakukan pemantauan demi menjaga terciptanya sebuah lingkungan keorganisasian yang kondusif untuk mengoperasionalkan strategi yang telah diformulasikan. Huff dalam Heene (2010:178) mengungkapkan upaya mengkombinasikan antara kebijakan memberikan hadiah berdasarkan kepatuhan akan pelaksanaan atas keputusan-keputusan strategis yang telah dirumuskan, pengembangan teknik-teknik persuasif untuk menjamin hadirnya partisipasi dari berbagai partisipan (rekanan) selama berlangsungnya proses implementasi termasuk juga dalam meningkatkan intensitas keterlibatan.

Amir (2011:192) menyatakan implementasi strategi merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengeksekusi perencanaan strategik. Artinya, apa yang dirumuskan pada strategi dan kebijakan akan diterapkan dalam berbagai program kerja, anggaran dan prosedur-prosedur. Rumusan strategi yang baik tidak ada artinya bila tidak diterapkan dalam implementasi, begitu juga sebaliknya. Implementasi berkaitan dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu organisasi, lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan implementasi strategi merupakan jumlah keseluruhan aktivitas dan proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur dan anggaran dimana dalam pengembangan strateginya dilakukan dalam sebuah tindakan.

1) Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Strategi

Heide dalam Heene (2010:181) menyatakan bahwa kemampuan dalam mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil dipengaruhi oleh tujuh faktor, yaitu:

a. Sistem informasi dari organisasi

Suatu pengimplementasian strategi yang berhasil menuntut adanya lalu lintas informasi yang relevan dan juga *continue* yang mencakup ke seluruh bagian organisasi.

b. Kemampuan proses belajar dari organisasi

Implementasi dari suatu strategi tidak saja menuntut bahwa semua partisipan harus memahami akan strategi itu, akan tetapi mereka juga harus dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk mampu mengimplementasikan strategi dengan sukses.

c. Pengalokasian sarana-sarana organisasi secara menyeluruh

Tanpa ketersediaan sarana-sarana yang memadai termasuk sarana yang secara khusus dipersiapkan dapat dikatakan an sulit untuk mengimplementasikan suatu strategi dengan berhasil.

d. Struktur organisasi yang baku

Struktur baku suatu organisasi akan berdampak secara tidak langsung terhadap implementasi dari strategi melalui dampaknya terhadap alur informasi, monitoring dan proses pengambilan keputusan di dalam organisasi.

e. Kebijakan tentang manajemen SDM dari organisasi

Keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu strategi akan bergantung pada dedikasi para partisipan perorangan yang merasa bertanggung jawab mewujudkan strategi tersebut ke dalam realitas.

f. Merangkul pengaruh politis di tubuh organisasi

Ketika para partisipan tertentu atau kelompok-kelompok partisipan mempersepsikan sebuah strategi sebagai sesuatu yang meredusir kekuasaan dirinya ataupun statusnya, maka mereka akan menghambat upaya implementasi.

g. Kultur dari organisasi

Kultur suatu organisasi mencakup keseluruhan dari sistem-sistem kognitif, nilai-nilai, maupun pola-pola perilaku yang melekat dalam organisasi. Suatu strategi yang kurang adaptif terhadap kultur organisasi akan melahirkan penolakan yang keras dan semakin menghambat segenap upaya bagi pengimplementasiannya secara efektif.

2) Indikator Keberhasilan Implementasi Strategi

Keberhasilan implementasi suatu strategi menuntut adanya upaya prakondisi terhadap segenap proses implementasinya. Seolah-olah sebelumnya perlu dipersiapkan terlebih dahulu semacam basis pertahanan bagi strategi. Menurut Beaudan dalam Heene (2010:184) sebuah strategi baru dapat diimplementasikan dengan sukses bila para manajer menaruh perhatian pada tiga tuntutan implementasinya, yaitu;

a) Kejelasan persepsi

Langkah pertama agar suatu strategi dapat dipahami bersama adalah dengan memperjelas makna dari strategi tersebut. Tanpa adanya pemahaman mendalam dari masyarakat mengenai strategi tersebut hampir tidak mungkin untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Sedangkan upaya memperjelas makna strategi terdiri dari dua proses, interpretasi dan penerimaan. Oleh karena itu, para manajer wajib menjaga agar setiap individu baik di dalam organisasi akan menginterpretasikan strategi dengan pemahaman yang sama. Di samping itu para partisipan secara individual wajib menaati strategi itu. Suatu strategi yang oleh para

partisipannya dianggap kurang realistis sulit untuk berhasil dengan baik melewati tahapan transisional dari formulasi ke implementasi.

b) Keterkaitan kolektif

Langkah selanjutnya mengembangkan keterkaitan strategi dengan para partisipan orang per orang. Keterkaitan strategi organisasi ini dengan para partisipan pada awalnya menjadi pendorong munculnya partisipasi. Jadi, para partisipan perorangan yang mulai tumbuh keyakinan dirinya ini akan merasa pula bahwa mereka memiliki kompetensi-kompetensi individual untuk mengimplementasikan strategi secara efektif dan efisien.

c) Keteguhan tekad

Dalam pengimplementasian pun menuntut hadirnya fleksibilitas dari semua jajaran organisasi. Sering munculnya ketidakterdugaan dari strategi ini menimbulkan dampak yang mempersulit kita untuk mengevaluasi seberapa besar kerja keras yang proposional yang dibutuhkan saat menjalani proses demikian sehingga akhirnya semakin mempersulit untuk menentukan ritme yang tepat.

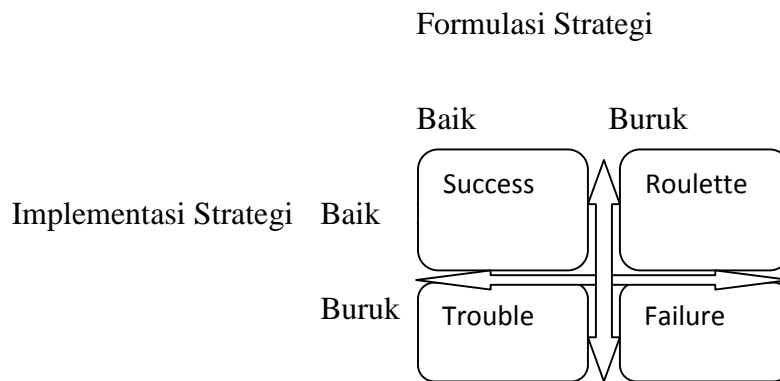
Perumusan strategi atau formulasi strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah ke depan yang dimaksudkan untuk membangun visi dan misi organisasi, menetapkan tujuan organisasi dan keuangan perusahaan, serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menyediakan *customer value* terbaik.

Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses dimana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci suksesnya dari manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang.

Proses manajemen strategik belum dapat dikatakan selesai ketika perusahaan memutuskan strategi apa yang akan ditempuh. Perusahaan masih harus menterjemahkan rumusan strategi tersebut ke dalam tindakan strategik. Kita harus selalu ingat bahwa sebaik apapun rumusan strategi, hanya akan menjadi retorika belaka jika tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Oleh karena itu, agar perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal, maka selain harus mampu merumuskan strategi, perusahaan juga harus mampu mengimplementasikan strategi tersebut secara efektif. Jika salah satu “langkah” tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik, maka tidak mustahil perusahaan akan memetik kegagalan. Bahkan, rumusan strategi yang sempurna sekalipun hanya akan memberikan kontribusi yang minim bagi pencapaian tujuan perusahaan jika tidak mampu diimplementasikan dengan baik.

Banyak perusahaan atau organisasi yang banyak menghabiskan sumber dayanya (uang, waktu, tenaga) untuk mengembangkan rencana strategik yang “ampuh”. Namun kita harus ingat bahwa perubahan hanya akan terjadi melalui suatu *action*

(implementasi), bukan sekedar perencanaan. Rumusan strategi yang secara teknis kurang sempurna jika diimplementasikan dengan baik, maka akan didapat hasil yang lebih baik dibandingkan dengan rumusan strategi yang sempurna namun hanya diatas. Untuk memahami hubungan antara perumusan strategi dan implementasi strategi, mari kita perhatikan gambar berikut.



Gambar 1. Hubungan Formulasi Strategi dan Implementasi Strategi

Sumber: Manajemen strategi (Dirgantoro, 2001 : 122)

Berdasarkan gambar di atas, ada berbagai kemungkinan yang terjadi antara formulasi strategi dengan implementasi strategi, yaitu :

- a. *Succes* : merupakan hasil yang paling diidamkan-idamkan oleh setiap perusahaan. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik begitu juga dalam implementasinya.
- b. *Trouble* : merupakan situasi di mana perusahaan menyusun formulasi strateginya dengan baik namun implementasinya buruk.

- c. *Roulette* : merupakan situasi di mana perusahaan kurang baik dalam memformulasi strateginya, namun perusahaan melakukan implementasi yang cukup baik.
- d. *Failure* : kondisi ini sangat tidak diinginkan oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan tidak diformulasikan dengan baik, demikian juga dalam implementasinya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara formulasi strategi dengan implementasi strategi. Meskipun berhubungan, secara fundamental antara formulasi strategi dengan implementasi strategi terdapat perbedaan. Fred R. David (2005 : 12) membedakan antara formulasi strategi dan implementasi strategi sebagai berikut.

Tabel 3. Perbedaan Formulasi strategi dan Implementasi strategi

NO	Formulasi Strategi	Implementasi Strategi
1.	Perumusan strategi adalah memposisikan kekuatan sebelum dilakukan tindakan.	Implementasi strategi adalah mengelola kekuatan yang “manage” semua aspek selama tindakan dijalankan.
2.	Berfokus pada efektivitas.	Berfokus pada efisiensi.
3.	Lebih merupakan proses intelektual.	Lebih merupakan proses operasional.
4.	Mebutuhkan keahlian intuitif dan analisis yang tajam.	Mebutuhkan motivasi khusus dan keahlian kepemimpinan.
5	Mebutuhkan koordinasi diantara beberapa individu	Mebutuhkan koordinasi diantara banyak individu.

Sumber: Manajemen strategi (David, 2005: 12)

Perumusan strategi dan implementasi strategi harus sesuai dengan tujuan strategis dan misi strategis. Tujuan strategis dan misi strategis disusun berdasarkan informasi yang diperoleh dari analisis lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Perusahaan mempelajari lingkungan eksternal dan internal agar dapat mengidentifikasi peluang-peluang dan ancaman pasarnya dan menentukan bagaimana menggunakan kompetensi-kompetensi intinya dalam usaha mendapatkan hasil strategisnya yang diinginkan. Dengan pengetahuan ini, perusahaan membentuk tujuan-tujuan strategis, misi strategis mensefisikasi, secara tertulis, produk-produk yang ingin diproduksi oleh perusahaan tersebut dan pasar yang ingin dilayani ketika mendayagunakan sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi-kompetensinya.

c. Evaluasi Strategi

Tahap akhir dalam manajemen strategi, para manajer harus benar-benar mengetahui alasan strategi-strategi tertentu tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam hal ini, evaluasi strategi adalah cara pertama untuk memperoleh informasi. Semua strategi dapat diubah sewaktu-waktu karena faktor-faktor eksternal dan internal selalu berubah. Tiga kegiatan pokok dalam evaluasi yaitu meliputi:

- 1) Mengkaji ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan perumusan strategi yang diterapkan sekarang ini.
- 2) Mengukur kinerja.
- 3) Melakukan tindakan-tindakan korektif.

Sama halnya dengan proses manajemen strategi yang memiliki lima tahapan yaitu analisis lingkungan, penetapan misi dan tujuan, perumusan strategi, pilihan dan penerapan strategi dan evaluasi atau pengendalian strategi.

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dalam proses manajemen. Evaluasi strategi digunakan untuk memperoleh langkah yang efisien setelah strategi sebelumnya tidak berkerja dengan baik. Proses manajemen strategis menghasilkan keputusan yang dapat memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Penilaian dilakukan dengan mengukur faktor-faktor atau indikator sukses yang dicapai dan mengevaluasi keberhasilan kinerja dari strategi guna perumusan dan penerapan lanjutan dimasa yang akan datang agar lebih baik dan efektif.

David (2004:308) mengemukakan tiga kegiatan dasar dalam evaluasi strategi, yakni;

1. Memeriksa dasar yang mendasari strategi perusahaan;
2. Membandingkan hasil yang diharapkan dengan rencana aktual;
3. Mengambil tindakan korektif untuk memastikan kinerja yang sesuai dengan rencana.

Evaluasi strategi penting karena organisasi menghadapi lingkungan yang dinamis dimana faktor eksternal dan internal berubah dengan cepat dan drastis. Selain itu evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan tercapai.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam proses manajemen strategi yang menghasilkan keputusan jangka panjang serta sebagai indikator penilaian antara strategi yang dirumuskan dengan hasil strategi yang dihasilkan. Dalam evaluasi strategi terdapat tiga kegiatan mendasar yakni; (1) memeriksa dasar; (2) membandingkan hasil dan; (3) mengambil tindakan korektif.

a) Proses Evaluasi Strategi

David (2004:311) menyatakan bahwa proses evaluasi strategi harus mempertanyakan harapan dan asumsi manajerial, harus memicu tinjauan sasaran nilai serta harus merangsang kreativitas dalam menghasilkan alternatif dan memformulasikan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dilaksanakan secara berkelanjutan, bukan hanya diakhir periode waktu tertentu atau hanya setelah terjadi masalah. Evaluasi strategi diperlukan untuk semua ukuran dan jenis organisasi. Jika asumsi dan harapan menyimpang secara signifikan dari perkiraan, organisasi atau perusahaan harus memperbaharui kegiatan perumusan strategi.

Amir (2011:207) mengemukakan bahwa seperti pada proses pengawasan pada umumnya, proses evaluasi strategi dimulai dari apa yang harus diukur, menetapkan standar kinerja, melakukan pengukuran dan apabila terjadi tidak sesuai dengan harapan maka harus melakukan tindakan koreksi.

1. Menentukan apa yang harus di ukur

Dalam menentukan apa yang harus di ukur fokuskan pada elemen-elemen yang paling signifikan yakni sesuatu yang paling banyak perannya dalam pengeluaran atau masalah-masalah lain.

2. Melakukan pengukuran atas kinerja aktual

Pengukuran harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Misalnya dengan mengadakan rapat, dorongan akan dirasakan pada rapat evaluasi tersebut dimana para manajer dalam situasi formal akan terdorong untuk menyajikan yang terbaik, sehingga menjalankan aktivitasnya yang terbaik.

3. Membandingkan kinerja aktual dengan standar yang dibuat

Jika kinerja aktual berada di luar rentang toleransi, maka tindakan yang harus diambil untuk mengoreksi kinerja. Tindakan koreksi yang dibuat diharapkan tidak hanya sekedar memperbaiki atau mengoreksi penyimpangan tapi yang paling penting adalah agar kesalahan tidak terulang lagi.

b) Kriteria Evaluasi Strategi

Terdapat beberapa ciri yang dapat menjadi indikator terhadap efektifitas dari suatu strategi dan sekaligus mengisyaratkan apakah strategi itu cukup “kredibel” untuk direalisasikan. Menurut Rumelt dalam Heene (2010:186), ciri-ciri tersebut dapat dirinci menjadi empat kriteria yakni;

1. Konsistensi

Suatu strategi tidak diperkenankan sedikitpun untuk merumuskan berbagai pencanangan sasaran maupun langkah-langkah operasional yang serba inkonsistensi. Strategi tidak boleh saling bertentangan antara sasaran dan kebijakan;

2. Penyesuaian diri

Suatu strategi harus senantiasa memberikan respon adaptif atas munculnya kendala-kendala dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi;

3. Penciptaan nilai

Suatu strategi harus senantiasa meracik jalan keluar konseptual positif yang mendorong upaya penciptaan nilai seoptimal mungkin;

4. Potensi diri

Suatu strategi harus senantiasa tidak diperkenankan menilai secara berlebihan terhadap sarana-sarana yang tersedia ataupun merekayasa kreasi-kreasi baru yang justru sulit ditangani.

c) Manfaat evaluasi strategi

Evaluasi strategi penting untuk memastikan tujuan-tujuan strategi yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Selain itu evaluasi strategi juga bertujuan untuk mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Karena dalam proses evaluasi strategi juga terdapat aktivitas mendasar mengenai analisa tentang faktor-faktor internal dan eksternal dimana faktor-faktor tersebut selalu berubah. Oleh karena itu evaluasi strategi dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi organisasi haruslah secara terus menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan

yang selalu terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Evaluasi strategi juga merupakan serangkaian penilaian melalui beberapa indikator tertentu untuk mengetahui hasil implementasi dari sebuah strategi. Menurut Hubeis dan Najib (2014:28) proses evaluasi strategi ditujukan untuk memastikan apakah tindakan-tindakan strategik yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan perumusan strategi yang telah dibuat atau ditetapkan.

4. Dimensi-dimensi Strategi

Terdapat empat dimensi pokok yang terkandung dalam strategi menurut Robbins (2010: 125) yaitu:

- a. Inovasi. Strategi inovasi secara khusus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang mengutamakan inovasi sebagai sumber keunggulan bersaing. Tidak semua perusahaan atau organisasi melakukan strategi inovasi, tetapi pada saat-saat tertentu barangkali strategi ini dirumuskan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Misalnya perombakan birokrasi pada suatu badan pemerintahan barangkali membutuhkan strategi inovasi yang bersifat khusus dalam rangka memperbaiki layanan.
- b. Diferensiasi Pasar. Strategi diferensiasi pasar ditujukan untuk menciptakan loyalitas konsumen melalui suatu produk atau jasa yang bersifat unik, dalam arti berbeda dari yang telah ada di pasar. Strategi ini tidak mesti dengan menciptakan produk atau jasa yang berkelas tinggi atau mahal, melainkan sesuatu yang memiliki nilai tambah yang berbeda dari produk-produk atau jasa yang sudah ada.

Strategi ini biasanya diperkuat dengan iklan, segmentasi pasar, dan permainan pasar (*pricing*)

- c. Jangkauan (*Breadth*). Strategi jangkauan adalah penetapan ruang lingkup pasar yang akan dilayani oleh organisasi: ragam atau jenis konsumen, cakupan geografisnya, dan jenis produk atau jasa yang akan ditawarkan. Ada organisasi yang sengaja memilih fokus jangkauan yang terbatas, misalnya hanya untuk kategori konsumen, wilayah, atau produk dan jasa tertentu, ada pula yang mengembangkan jangkauannya seluas-luasnya dengan tujuan menguasai pangsa pasar.
- d. Pengendalian Biaya (*Cost-control*). Strategi pengendalian biaya adalah sejauh mana perusahaan mengontrol biaya atau anggaran secara ketat. Strategi ini penting, khususnya ketika pengelola organisasi harus mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai secara maksimum tujuan-tujuan organisasi.
- Keempat dimensi tersebut merupakan unsur-unsur penting yang selalu dicermati oleh penyusun strategi. Jadi, ketika mengembangkan strategi seorang pengelola organisasi perlu memutuskan apakah organisasi mengedepankan inovasi atau cukup menggunakan proses atau mekanisme konvensional.

5. Tipe-tipe strategi

Setiap organisasi pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Tipe strategi yang digunakan dalam suatu organisasi tidaklah sama. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi:

1) *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Strategi ini berkaitan dengan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan untuk siapa.

2) *Program Strategy* (Strategi Program)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi dari suatu program tertentu. Kira-kira apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan (apa dampaknya bagi sasaran organisasi)

3) *Resource support strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya tersebut dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

4) *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah strategi organisasi. Hal tersebut dikarenakan strategi organisasi merupakan suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang. Strategi organisasi meliputi kebijakan, program dan kegiatan manajemen untuk

melaksanakan misi organisasi. Seperti yang di ungkapkan oleh (Akdon, 2011:150) Tipe organisasi ini mencakup bagaimana sasaran kinerja harus dipenuhi, bagaimana suatu organisasi akan memperbaiki kinerja pelayanannya dan bagaimana suatu organisasi akan melaksanakan misinya.

6. Analisis Lingkungan

Menurut Dirgantoro (2001:38) analisis lingkungan adalah suatu proses monitoring terhadap lingkungan organisasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Analisis lingkungan perusahaan biasanya terdiri dari dua komponen pokok, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Secara umum, tujuan perusahaan melakukan analisis lingkungan adalah untuk menilai lingkungan organisasi secara keseluruhan. Lingkungan organisasi ini adalah faktor-faktor yang berada di luar atau di dalam organisasi yang dapat memengaruhi organisasi tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Dengan demikian, manajemen dapat memberikan reaksi yang sesuai dan proporsional untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Menurut Certo dan Peter dalam Hubeis dan Najib (2014), ada beberapa peran utama mengenai analisis lingkungan :

a. *Policy-Oriented Role*

Peran yang dimaksud disini adalah peran analisis yang berorientasi pada kebijakan manajemen tingkat atas dan bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan memberikan informasi bagi manajemen tingkat atas tentang kecenderungan utama yang muncul dalam lingkungan.

b. *Integrated Strategic Planning Role*

Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan membuat manajemen tingkat atas dan manajer divisi menyadari segala isu yang terjadi di lingkungan perusahaan yang memiliki implikasi langsung pada proses perencanaan.

c. *Function-Oriented Role*

Peran ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan menyediakan informasi lingkungan yang memberi perhatian pada efektivitas kinerja fungsi organisasi tertentu. Peran ini berorientasi pada masalah tertentu yang menjadi target utama dalam perusahaan.

Dasar pemikiran mengapa analisis lingkungan ini harus dilakukan adalah *general system theory*. Menurut teori ini, organisasi dewasa ini lebih merupakan sistem yang terbuka. Oleh karena itu organisasi sangat dipengaruhi dan berinteraksi secara konstan dengan lingkungan yang melingkupinya. Dengan demikian tugas utama yang paling penting bagi manajemen perusahaan adalah memastikan bahwa pengaruh tersebut dapat disalurkan melalui arah yang positif dan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap keberhasilan dan pencapaian daya saing organisasi secara keseluruhan.

A. Lingkungan Internal

Lingkungan internal adalah lingkungan organisasi yang berada dalam organisasi dan secara normal memiliki implikasi langsung dan khusus pada perusahaan. Lingkungan internal tersebut yang nantinya akan memunculkan kelemahan dan juga kekuatan dari perusahaan. Apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan internal seharusnya lebih mudah diidentifikasi karena berada di dalam organisasi. Semua organisasi memiliki kekuatan-kekuatan atau kelemahan-kelemahan di dalam fungsi manajemennya, tidak ada organisasi yang sama kuat dalam semua fungsinya. Perusahaan perlu mengukur kepentingan strategi dari kompetensi internalnya dengan dasar peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan industri kompetitif perusahaan. Organisasi dapat mengetahui kekuatan dan kelemahannya melalui analisis lingkungan internal. Menurut Jauch dan Glueck dalam Amirullah (2015:58) analisis internal merupakan proses dengan mana perencana strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan, penelitian dan pengembangan, produksi, dan operasi, sumber daya dan karyawan perusahaan serta faktor-faktor keuangan dan akuntansi untuk menentukan dimana perusahaan mempunyai kemampuan yang penting, sehingga perusahaan memanfaatkan peluang dengan cara yang paling efektif dan dapat menangani ancaman di dalam lingkungan.

Menurut Mooney James D dalam teori manajemen sumber daya organisasi terbagi menjadi 3 antara lain *Man*, *Facilities* (uang, material, mesin), dan *method* yang merupakan unsur manajemen dan ketiga unsur tersebut merupakan faktor internal dalam organisasi. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Man

Dalam manajemen faktor manusia adalah yang paling menentukan, manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

b. Facilities

Mooney James memasukkan unsur-unsur uang, material dan mesin ke dalam istilah yang disebut fasilitas. *Money* atau uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

Material terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

Kemudian *machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Sedangkan metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.

c. Method

Sedangkan metode adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer, sebuah metode saat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen yaitu manusianya sendiri.

B. Lingkungan Eksternal

Analisis eksternal mencakup analisis terhadap kesempatan (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) berkaitan dengan tren sosial, ekonomi, politik, keinginan masyarakat, teknologi, dan regulasi yang mengatur organisasi. Dalam melakukan analisis lingkungan eksternal, organisasi menggali dan mengidentifikasi semua peluang yang berkembang dan menjadi tren pada saat itu serta mengidentifikasi ancaman dari para pesaing dan calon pesaing serta faktor eksternal lainnya. Menurut Hubeis dan Najib (2014) di dalam lingkungan umum eksternal organisasi, terdapat faktor-faktor yang memiliki ruang lingkup luas yang pada dasarnya berada di luar dan terlepas dari operasi organisasi. faktor-faktor lingkungan umum eksternal tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan organisasi. Faktor ekonomi mengacu pada sifat, cara, dan arah perekonomian tempat organisasi akan bertkmpetisi. Dalam era globalisasi, para analis juga harus menilai, memantau, dan meramalkan keadaan perekonomian negara-negara lain.

2. Faktor Sosial

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu perusahaan mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini, yang berkembang, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan tempat organisasi beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan, dan etnis. Seandainya faktor sosial berubah, permintaan untuk berbagai aktivitas juga turut mengalami perubahan.

3. Faktor Politik dan Hukum

Arah dan stabilitas faktor politik dan hukum merupakan pertimbangan utama bagi manajer dalam merumuskan strategi organisasi. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan organisasi harus beroperasi.

4. Faktor Teknologi

Faktor teknologi sebagaimana faktor-faktor lain dalam lingkungan umum merefleksikan kesempatan-dan ancaman bagi organisasi. Perubahan teknologi dapat mengurangi atau menghilangkan perbedaan biaya antar organisasi, menciptakan proses yang lebih singkat, menciptakan kelangkaan pada tenaga tekhnikal serta mampu mengubah nilai-nilai dan harapan para *stakeholders*.

5. Faktor Demografi

Hal penting yang harus diperhatikan organisasi menyangkut faktor demografi ini di antaranya ukuran populasi, struktur umur, distribusi geografis, percampuran etnis, dan distribusi harus menganalisis perubahan faktor ini dalam konteks yang global, bukan hanya secara domestik.

B. Tinjauan Tentang Partisipasi Masyarakat

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan

tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya. Ini berarti partisipasi terkait secara langsung dengan ide demokrasi, di mana prinsip dasar demokrasi adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Disamping itu, partisipasi masyarakat juga merupakan pemenuhan terhadap etika politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kekuasaan dan kedaulatan.

Dalam rangka pembangunan bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan, partisipasi masyarakat memainkan peranan penting. Bahkan Bintoro (Kaho, 2010: 125) menegaskan bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat di dalam suatu negara. Penegasan tersebut sama halnya dengan Arbi Sanit (Kaho, 2010: 126) apabila kita berbicara mengenai pembangunan, sesungguhnya yang dibicarakan ialah keterlibatan keseluruhan masyarakat sebagai sistem terhadap masalah yang dihadapinya dan pencarian jawaban bagi masalah tersebut.

Dengan demikian dari sudut ini, keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional, terutama di ukur dari derajat keterlibatan warganya dalam penyelenggaraan otonomi tersebut. Penyelenggaraan otonomi daerah tanpa partisipasi masyarakat tidak dapat dikatakan berhasil, sekalipun mungkin daerah tersebut telah mandiri. Masyarakat sendiri dapat berpartisipasi pada beberapa tahap, terutama dalam pembangunan, yakni: pada tahap

inisiasi, legitimasi, eksekusi. Atau dengan kata lain, pada tahap *decision making*, *implementation*, *benefit*, dan tahap *evaluation*.

Seperti yang dirumuskan Bintoro (Kaho, 2010: 127) pertama keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat tersebut dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan. Kedua adalah keterlibatan dalam memikul hasil dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan. Dari pendapat yang ada tersebut maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang:

a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan;

Menurut Moebiyarto (Kaho, 2010: 127) dalam keadaan yang paling ideal keikutsertaan masyarakat untuk membuat putusan politik yang menyangkut nasib mereka, adalah ukuran tingkat partisipasi rakyat. Semakin besar kemampuan untuk menentukan nasib sendiri, semakin besar partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Demikian pula secara sederhana dapat diketahui bahwa masyarakat hanya akan terlibat dalam aktivitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan;

Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari tahap diatas, menurut Uphoff (Kaho, 2010: 128) bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun

informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Hal penting yang perlu diperlukan di sini, kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri sudah terkategori ke dalam pengertian partisipasi.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil;

Anggota masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, rakyat/masyarakat daerah harus pula dapat menikmati hasilnya secara adil. Adil dalam pengertian di sini adalah setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan pengorbanannya dan menurut norma-norma yang umum diterima. Sedangkan norma-norma yang dapat dijadikan ukuran dapat berupa norma hukum(peraturan perundang-undangan), ataupun berupa nilai-nilai etika dan moral keagamaan. Menurut Uphoff dkk, (Kaho, 2010: 129) partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi yaitu: dari aspek manfaat materialnya (*material benefits*); manfaat sosialnya (*social benefit*) dan manfaat pribadi (*personal benefit*).

d. Partisipasi dalam evaluasi.

Setiap penyelenggaraan apapun dalam kehidupan bersama hanya dapat dilihat berhasil apabila dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Masyarakat sudah sepantasnya diberi kesempatan menilai hasil yang telah dicapai. Demikian pula dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dapat dijadikan hakim yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada. Sikap ikut memelihara dan melestarikan

hasil yang telah dicapai, dapat dilihat sebagai indikasi adanya dukungan positif anggota masyarakat terhadap apa yang dihasilkan.

2. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (Soeharno, 2004: 103) adalah kegiatan politik warga negara preman (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Dari pengertian partisipasi politik diatas maka Huntington dan Nelson memberikan batasan mengenai partisipasi politik yaitu;

1. Partisipasi yang menyangkut kegiatan-kegiatan dan bukan sikap-sikap. Hal-hal seperti sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan dengan bentuk tindakan politik bukan terpisah dari tindakan politik.
2. Subjek yang dimasukkan dalam partisipasi politik itu adalah warga negara preman (*Private Citizen*) atau lebih tepatnya orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik seperti pejabat pemerintah, pejabat partai, calon politikus, lobbi professional.
3. Kegiatan partisipasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang politik.
4. Mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu mempunyai efek atau tidak, berhasil atau gagal.
5. Mencakup partisipasi otonom dan partisipasi dimobilisasikan, partisipasi otonom yaitu kegiatan politik yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk

mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan adalah kegiatan politik yang dilakukan karena keinginan orang lain.

Miriam Budiardjo memberikan batasan yang lebih luas mengenai partisipasi politik (Soeharno: 2004, 104), ia memandang bahwa partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kegiatan politik, misalnya dalam pemilihan pemimin negara, mempengaruhi kebijaksanaan negara dan berbagai kegiatan lainnya. Partisipasi politik yang demikian merupakan tindakan-tindakan yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, terlepas apakah itu legal atau tidak. Dengan itu protes-protes, demonstrasi, kekerasan bahkan bentuk kekerasan pemberontakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dapat disebut sebagai partisipasi politik (Sudjiono Sastroatmodjo, 1995: 67-79).

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, kita dapat membedakan jenis-jenis perilaku perilaku yang berkaitan dengan partisipasi politik sebagai berikut;

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga menyangkut sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam sebuah pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya, dan oleh sebab itu

factor-faktor yang berkaitan dengan kejadian itu seringkali membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya.

2. Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan orang banyak.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam sebuah organisasi yang tujuan utama dan eksplisinya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*Contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu atau segelintir orang (Samuel dan Nelson: 1994, 16-17).

Sifat yang berseberangan dengan partisipasi politik adalah sikap apatis secara sederhana sekali bisa didefinisikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gajala pada umumnya atau pada khususnya. Dari sudut pandang sosiologis, dapat diterapkan pada masyarakat secara umum atau hanya pada aspek-aspek tertentu dari masyarakat. Karena itu, sejauh mengenai partisipasi politik, sifat yang paling penting dari seorang yang apatis adalah kepasifanya atau tidak adanya kegiatan politik.

3. Fungsi Partispasi Politik

Menurut Robert Lane (Suharno, 2004: 107) partisipasi politik memiliki empat fungsi partisipasi politik bagi individu-individu yaitu;

1. Fungsi pertama sebagai sarana untuk mengejar kebutuhan ekonomi, partisipasi politik seringkali muncul dalam bentuk upaya-upaya menjadikan arena politik untuk memperlancar usaha ekonominya ataupun sebagai sarana untuk mencari keuntungan material.
2. Fungsi kedua sebagai sarana untuk memuaskan suatu kebutuhan bagi penyesuaian sosial, yakni memenuhi kebutuhan akan harga diri, meningkatnya status sosial, dan merasa terhormat karena dapat bergaul dengan pejabat-pejabat terkemuka dan penting. Pergaulan yang luas dan bersama pejabat-pejabat itu pula yang mendorong partisipasi seseorang untuk terlibat dalam aktivitas politik. Orang-orang yang demikian itu merasa puas bahwa politik dapat memenuhi kebutuhan terhadap penyesuaian sosialnya.
3. Fungsi ketiga sebagai sarana untuk mengejar nilai-nilai khusus, orang berpartisipasi dalam politik karena politik dianggap dapat dijadikan sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu seperti untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan proyek-proyek, tender-tender, dan melicinkan karier bagi pejabatnya.

4. Bentuk-Bentuk Partispasi Politik

Salah satu bentuk partisipasi politik adalah mengikuti kegiatan organisasi politik, yang oleh Almond dikatakan sebagai kegiatan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan. Mengikuti organisasi biasanya dimaksudkan untuk turut serta mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan (sudjiono, 1995:74).

Apabila dilihat dari sudut pandang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan maka menurut Sastroatmojo (Soeharno, 2004: 104) dapat dibagi menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup kegiatan warga negara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan saran dan kritik untuk mengoreksi kebijakan pemerintah. Sedangkan partisipasi pasif mencakup kegiatan mentaati peraturan/pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

Ditinjau dari sudut pandang kadar dan jenis aktivitasnya maka menurut Milbart dan Goel (Soeharno, 2004: 104) membagi partisipasi politik dalam beberapa kategori yaitu;

1. Apatitis (masa bodoh) yaitunorang yang menarik diri dari aktivitas politik.
2. Spektator yaitu orang-orang yang paling tidak, pernah ikut dalam pemilihan umum.

3. Gladiator yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.
4. Pengeritik yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional

Partisipasi politik apabila dipandang dari segi stratifikasi sosial maka menurut Goel dan Oslan (Suharno, 2004: 105-106) terbagi atas beberapa hal yakni;

1. Pemimpin politik
2. Aktivitas politik
3. Komunikator, yaitu orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi politik kepada orang lain
4. Warga negara marginal yaitu orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik
5. Orang-orang yang terisolasi, yaitu orang-orang yang jarang melakukan kontak dengan system politik

Partisipasi politik juga dapat dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku, yakni individu dan kolektif. Individu adalah perorangan, sedangkan kolektif adalah kegiatan warga negara secara serentak untuk memengaruhi penguasa. Partisipasi politik kolektif dibedakan menjadi dua, yaitu partisipasi kolektif yang konvensional seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum dan partisipasi kolektif yang tidak konvensional (agresif), seperti pemogokan yang tak sah, menguasai bangunan

umum, dan huru-hara. Selanjutnya, partisipasi politik kolektif secara agresif dibedakan menjadi dua, yaitu aksi yang kuat dan aksi yang lemah. Aksi yang kuat dan lemah tidak menunjukkan sifat yang baik dan yang buruk. Dalam hal ini, kegiatan politik dapat dikategorikan kuat apabila memenuhi tiga kondisi berikut: bersifat antirezim, dalam arti melanggar peraturan mengenai partisipasi politik yang normal (melanggar hukum), mampu mengganggu fungsi pemerintahan, dan harus merupakan kegiatan kelompok yang dilakukan oleh non-elit (Basrowi dkk, 2012: 72).

C. Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Adanya pemilu maka telah melaksanakan kedaulatan rakyat sebagai perwujudan hak asas politik rakyat, selain itu dengan adanya pemilu maka dapat melaksanakan pergantian pemerintahan secara aman, damai dan tertib, kemudian untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 2012 pasal 1, bahwa pemilihan umum selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengertian Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.

Walaupun setiap warga negara Indonesia (laki-laki dan wanita) mempunyai hak untuk memilih, namun UU Pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta di dalam pemilihan umum. Batas waktu untuk menetapkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, adapun ketentuan batas umur 17 tahun yaitu berdasarkan perkembangan kehidupan politik di Indonesia, bahwa warga negara Republik Indonesia yang telah mencapai umur 17 tahun, ternyata sudah mempunyai pertanggung jawaban politik terhadap negara dan masyarakat, sehingga sewajarnya diberikan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat.

Pemilihan umum dilakukan secara rahasia. Rahasia yang dimaksud adalah para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapa pun dan dengan jalan apa pun, siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada suara-suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan.

Pemilihan umum diadakan secara bebas. Maksudnya bahwa tiap-tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan maupun paksaan dari siapa pun atau apa pun juga.

Pada paparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung, sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional, serta proses bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu juga merupakan ajang dimana masyarakat dapat merasakan keterlibatannya dalam suatu negara dengan cara ikut berpartisipasi dalam pemilu.

2. Macam-macam Pemilihan Umum

a. Pemilihan Presiden (Pilpres)

Presiden adalah pemimpin kekuasaan eksekutif dan dapat dipilih sebanyak-banyaknya dua kali untuk jangka waktu masing-masing lima tahun. Sebuah partai politik atau koalisi partai politik yang memenangkan 25 persen suara sah atau memperoleh paling sedikit 20 persen kursi DPR dapat mengajukan calon untuk pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden diadakan setelah Pemilu legislatif guna memastikan pemenuhan persyaratan diatas dalam mencalonkan diri menjadi Presiden. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat.

b. Pemilu Legislatif (Pileg)

Pemilu legislatif di Indonesia bertujuan untuk memilih anggota legislatif. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilu legislatif bahwa Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia, terdapat dua lembaga legislatif nasional yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pilkada adalah upaya demokrasi untuk mencari pemimpin daerah yang berkualitas dengan cara-cara yang damai, jujur dan adil. Salah satu prinsip demokrasi yang terpenting adalah pengakuan terhadap perbedaan dan penyelesaian perbedaan secara damai. Upaya penguatan demokrasi lokal melalui pilkada langsung adalah mekanisme yang tepat sebagai bentuk terobosan atau tidak berjalannya pembangunan demokrasi di tingkat lokal.

Pemilihan umum daerah yang resmi diselenggarakan oleh komisi pemilihan umum disebut Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilukada. Pemilukada adalah pemilihan umum terputus (*staggered*) untuk memilih kepala dan wakil kepala eksekutif di 33 provinsi kecuali Yogyakarta dan di 502 kabupaten/kota.

3. Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan Pemilihan Umum yang utama ialah :

- a. Memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di dalam Lembaga Permusyawaratan atau Perwakilan.
- b. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan tegak berdirinya NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).
- c. Memilih wakil-wakil rakyat yang akan mempertahankan dasar falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila.
- d. Memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan negara kesatuan RI.

4. Fungsi Pemilihan Umum

Terdapat empat fungsi terpenting pemilu, yaitu sebagai berikut :

- a. Legitimasi politik

Melalui pemilu, legitimasi pemerintah atau pengusaha dikukuhkan karena pemerintah terpilih hakikatnya adalah pilihan rakyat terbanyak yang memiliki kedaulatan. Dalam hal ini, kebijaksanaan yang dibuat pemerintah selaku *decision maker* akan memperoleh dukungan atau sanksi yang kuat, karena keduanya berlandaskan sepenuhnya pada aspirasi rakyat bukan pemaksaan.

b. Terciptanya perwakilan politik

Seleksi kepemimpinan dan perwakilan dapat dilakukan secara lebih fair karena keterlibatan warga negara. Praktek demokrasi modern, praktek demokrasi yang dilakukan melalui perwakilan dapat dilakukan sepenuhnya.

c. Sirkulasi elit politik

Dengan Pemilu, terjadinya sirkulasi atau pergantian elit kekuasaan dilakukan secara lebih adil, karena warga negaralah yang langsung menentukan siapa yang masih dianggap memenuhi syarat sebagai elit politik dan siapa yang tidak. Secara tidak langsung ini pula menggambarkan bahwa Pemilu memiliki fungsi kontrol warga negara terhadap pemerintahnya.

d. Pendidikan politik

Pemilu berfungsi sebagai alat untuk melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar dapat memahami hak dan kewajiban politiknya. Dengan keterlibatan dalam proses pelaksanaan pemilu, diharapkan warga negara akan mendapat pelajaran langsung tentang bagaimana selayaknya warga negara berkiprah dalam sistem demokrasi. Sehingga pada tataran selanjutnya akan mengakar pemahaman bahwa warga negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi dan sangat menentukan gerak serta perjalanan bangsa dan negara.

5. Sistem Pemilihan Umum

Ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada 2 prinsip pokok, yaitu :

a. *Single-member constituency* (satu daerah memilih atau wakil; biasanya disebut Sistem Distrik). Sistem yang mendasarkan pada kesatuan geografis. Jadi setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang diliputi) mempunyai satu wakil dalam dewan perwakilan rakyat. Sistem ini mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya :

- 1) Kurang memperhitungkan adanya partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpecah dalam beberapa distrik.
- 2) Kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya.

Disamping itu sistem ini juga mempunyai kelebihan, antara lain :

- a) Wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungannya dengan penduduk distrik lebih erat.
- b) Lebih mendorong kearah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
- c) Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai yang mempermudah terbentuknya pemerintah yang stabil dan meningkatkan stabilitas nasional.

d) Sederhana dan mudah untuk diselenggarakan.

b. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau Sistem Perwakilan Berimbang). Gagasan pokok dari sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sesuatu golongan atau partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya.

Sistem ini ada beberapa kelemahan:

- 1) Mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai baru
- 2) Wakil yang terpilih merasa dirinya lebih terikat kepada partai dan kurang merasakan loyalitas kepada daerah yang telah memilihnya
- 3) Mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua-partai atau lebih.

Keuntungan *system propotional*:

- a) Sistem proposional di anggap representatif, karena jumlah kursi partai dalm parlemen sesuai dengan jumlah suaramasyarakat yang di peroleh dalam pemilu.
- b) Sistem ini di anggap lebih demokatis dalam arti lebih *egalitarian*, karena praktis tanpa ada distorsi.

D. Kerangka Pikir

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan agenda politik untuk menentukan format dan arah masa depan demokratisasi Indonesia, melalui mekanisme keikutsertaan warga negara secara langsung dalam kancah politik praktis dalam mengartikulasi aspirasi dan kepentingan. Pemilu adalah wujud nyata keterlibatan warga dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga legislatif.

Dalam hal ini, kerangka pemikiran peneliti yaitu bermula dari gejala pasang surutnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Kabupaten Way Kanan pada saat pemilihan umum Legislatif 2014 tingkat partisipasi masyarakat mencapai angka 75,6% sedangkan pemilihan umum Eksekutif mencapai angka 72,65%. Angka partisipasi tersebut terbilang menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 78% partisipasi masyarakat yang ikut merayakan pemilu.

Fenomena penurunan angka partisipasi yang terjadi di Way Kanan ini membuat pihak penyelenggara pemilu (KPU) berusaha keras untuk meningkatkan semangat partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan golput pada pemilu pada 2015 yang dengan mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peningkatan kinerja yang dilakukan oleh KPU Way Kanan merupakan wujud dari suatu upaya dalam peningkatan partisipasi. Berbagai strategi pun telah dilakukan

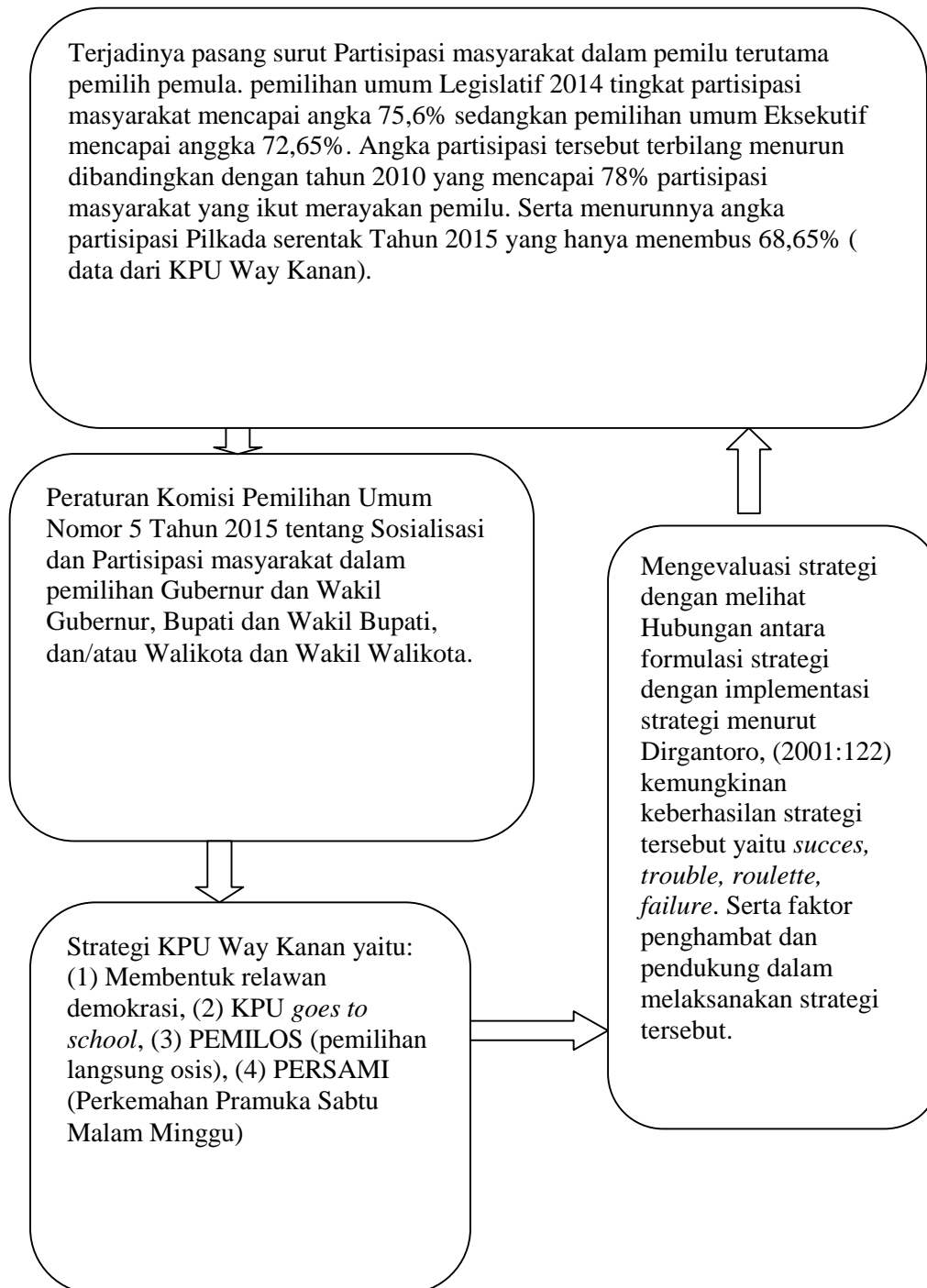
oleh KPU Way Kanan seperti melaksanakan KPU *goes to school* yaitu pemilihan langsung osis (pemilos) di sekolah – sekolah yang ada di Way Kanan secara serentak, membentuk relawan demokrasi, persami, pentas seni dan budaya, festival layang-layang demokrasi, kompetisi bola voli/sepakbola, karnaval hias roda, jalan sehat. membentuk relawan demokrasi, persami, pentas seni dan budaya, festival layang-layang demokrasi, kompetisi bola voli/sepakbola, karnaval hias roda,jalan sehat.

Strategi tersebut merupakan suatu upaya KPU demi meningkatkan partisipasi pemilih untuk ikut merasakan secara langsung makna dari pesta demokrasi. Namun kenyataannya, meskipun telah banyak strtategi-strategi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu, hal yang tidak bisa terhindarkan adalah masih banyaknya masyarakat yang golput. Hal tersebut terlihat jelas pada persentase di pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu, yang menunjukkan angka partisipasi yang hanya menembus 68,65%.

Persentase yang merupakan penurunan yang sangat drastis tersebutlah yang membuat peneliti ingin malakukan penelitian terkait evaluasi strategi tersebut. Pihak penyelenggara pemilu telah berusaha keras untuk meningkatkan partisipasi dengan berbagai macam upaya atau strategi yang dilakukan. Dalam hal ini bisa dikatakan suatu strategi mengalami kegagalan jika perumusan atau formulasi strategi yang dilakukan tidak maksimal, oleh sebab itu ketika KPU mengimplementasikan strategi tersebut berbuah tidak sesuai dengan harapan sebelumnya. Maka disinilah letak strategis peneliti untuk menganalisis proses berjalan strategi yang dilakukan oleh

KPU Way Kanan dengan cara mengevaluasi strategi yang telah dilakukan guna melakukan penilaian strategi untuk memastikan tujuan yang dicapai telah berjalan dengan baik atau tidak sesuai dengan hubungan formulasi strategi dengan implementasi strategi menurut Dirgantoro (2001 : 122)

Gambar 2. Model Kerangka Pemikiran



III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moelong (Herdiansyah, 2012: 9) berpendapat penelitian kualitatif, adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Adapun datanya berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen.

Jane Richie dalam Moleong (2007: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, yang lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sehingga, penelitian kualitatif menurut peneliti merupakan suatu prosedur penelitian yang bersifat deskriptif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti hanya akan memaparkan dan mengungkap fakta-fakta berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh

dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya, mengenai strategi apa yang akan dilakukan oleh KPU Way Kanan dalam meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula pilkada 2015.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian dengan metode kualitatif, hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga dalam pembatasan ini penelitian akan terfokus untuk memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Menurut Moleong (2007: 94) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. Agar tidak dimasukkan ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan walaupun data itu menarik.

Menurut Sugiyono (2009: 207) dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala dari suatu objek adalah bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi aspek tempat (*place*), perilaku (*actor*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi karena terlalu luasnya masalah. Maka untuk menghindari pembatasan masalah yang berlebihan diperlukan pembahasan yang disebut fokus.

\

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah penelitian pada:

1. Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula di pemilihan kepala daerah 2015 Kabupaten Way Kanan yaitu: (1) Membentuk relawan demokrasi, (2) KPU *goes to school*, (3) PEMILOS (pemilihan langsung osis), (4) PERSAMI (Perkemahan Pramuka Sabtu Malam Minggu). dengan melihat hubungan antara formulasi strategi dan implementasi strategi sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dirgantoro, (2001 :122) mengenai berbagai penilaian kemungkinan keberhasilan suatu strategi yaitu *succes, trouble, roulette dan failure*.
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi KPU dalam menjalankan strategi.

a. Faktor Eksternal

1) Faktor ekonomi

Kendala yang dilihat dari faktor ekonomi akan banyak berpengaruh terhadap penentuan kapasitas dalam menjalankan program yang direncanakan oleh organisasi, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi organisasi, pengaruh iklim dan lingkungan sosial dapat membantu / memperlambat pencapaian tujuan organisasi.

2) Faktor sosial

Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi suatu organisasi mencakup keyakinan, nilai, sikap, opini yang berkembang, dan gaya hidup dari orang-orang di lingkungan di mana organisasi beroperasi. Faktor-faktor ini biasanya dikembangkan dari kondisi kultural, ekologis, pendidikan dan kondisi etnis.

3) Faktor Politik dan Hukum

Arah dan stabilitas faktor politik dan hukum merupakan pertimbangan utama bagi manajer dalam merumuskan strategi organisasi. Faktor politik dan hukum mendefinisikan parameter-parameter hukum dan bagaimana pengaturan organisasi harus beroperasi.

4) Faktor teknologi

Adanya perubahan teknologi dapat mendorong munculnya kesempatan bisnis dan perbaikan upaya pencapaian tujuan organisasi, tapi dapat juga ancaman bagi kelangsungan produk yang sudah ada. Oleh karena itu perubahan teknologi sudah tentu berpengaruh terhadap siklus kehidupan. Ketetapan dan penilaian siklus kehidupan produk pada gilirannya dapat menentukan *timing* yang tepat untuk meluncurkan produk baru atau modifikasi produk yang ada.

b. Faktor Internal

1) Faktor sumber daya manusia (SDM)

Kendala dalam sumber daya manusia ini menunjukkan bahwa dalam faktor internal dapat berupa penilaian kapasitas dari SDM yang ada di lingkup organisasi yang bersangkutan seperti tingkat pendidikan, kemampuan yang dimiliki. Di mana kapasitas SDM merupakan salah satu penentu dari keberhasilan suatu tujuan.

2) Faktor ekonomi

Kendala yang dilihat dari faktor ekonomi akan banyak berpengaruh terhadap penentuan kapasitas dalam menjalankan program yang direncanakan oleh organisasi, hal tersebut dapat dilihat dari kondisi organisasi, pengaruh iklim

dan lingkungan sosial dapat membantu / memperlambat pencapaian tujuan organisasi.

3) Faktor Manajemen

Kendala dalam manajemen disini sangat menjadi tolak ukur bagi organisasi, dimana jika suatu organisasi tidak memiliki manajemen dalam menjalankan kegiatan maka organisasi tersebut tidak akan terarah sesuai tujuan. Manajemen dapat mencakup sebagai manajemen waktu ketika pelaksanaan kegiatan, kepemimpinan pada periode sekarang dan pengambilan keputusan di setiap kegiatan.

C. Lokasi Penelitian

Menurut Moleong (2007: 128), lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Selain itu perlu pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian seperti, keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga. Dengan mempertimbangkan hal tersebut dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian lokasi penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yang akan dilakukan di Kabupaten Way Kanan. Adapun alasan peneliti memilih Kabupaten Way Kanan, karena Way Kanan merupakan tempat yang sesuai dengan penelitian ini.

Dimana terdapat beberapa strategi menarik yang dilakukan oleh KPU Way Kanan yang tidak dilakukan oleh KPU di daerah lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data ini, terdapat tahapan proses yang peneliti lakukan di dalamnya. Adapun proses awalnya yaitu meminta izin terlebih dahulu dan memperkenalkan diri kepada salah satu Anggota Komisioner KPU Way Kanan. Dengan membawa surat izin formal dari Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan menjalin hubungan baik dengan instansi yang bersangkutan tersebut. Setelah itu peneliti memaparkan maksud dan tujuan peneliti untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak didalamnya.

Pada tahapan selanjutnya, dilakukan hubungan yang lebih akrab. Dimana hal tersebut dilakukan dalam rangka mencari informasi secara rinci agar peneliti dapat menangkap makna inti dari berbagai informasi yang diterima serta fenomena yang diamati. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2007). teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai persepsi, pendapat, kepercayaan dan sikap dari para

informan. Wawancara mendalam dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan panduan wawancara (*interview guide*). Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara ini adalah *tape recorder*, yang dilengkapi pula dengan catatan-catatan kecil peneliti. Adapun tabel daftar informan wawancara adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan/ Instansi	Waktu wawancara
1.	Iskardo	Ketua Umum KPU Way Kanan	16 Maret 2016
2.	Marson	Sekretaris KPU Way Kanan	16 Maret 2016
3.	Erwan Bustami	Komisioner KPU Way Kanan	20 November 2015 16 Maret 2016
4.	Mukti Astuti	Staf Ahli KPU Way Kanan	16 Maret 2016
5.	Awan Hartono	Staf Ahli KPU Way Kanan	16 Maret 2016
6.	Selvi	Staf Ahli KPU Way Kanan	16 Maret 2016
7.	Disisi Saidi F.	Relawan Demokrasi	16 Maret 2016
8.	Sigid Dwi S.	Relawan Demokrasi	16 Maret 2016
9..	Ismi Ramadhoni	Pemilih pemula SMAN 2 Kasui	17 Maret 2016
10.	Cecep Sopandi	Pemilih Pemula Ponpes Kasui	17 Maret 2016
11.	Agus Setiawan	Pemilih pemula SMAN 1 Negeri Agung	17 Maret 2016
12.	Yesi Ariska	Pemilih pemula SMAN 1 Bumi Agung	17 Maret 2016

Sumber: diolah oleh Peneliti 2016

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam yang dilakukan secara terstruktur untuk mengetahui tentang strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi pemilih khususnya pemilih pemula. Melalui wawancara ini juga, peneliti ingin mengetahui apa saja yang

menjadi kendala dalam strategi tersebut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di Way Kanan dalam pemilu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah terdahulu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek kesesuaian data, dan merupakan bahan utama dalam penelitian. Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-menyurat, peraturan-peraturan dan lain sebagainya. Sumber data ini merupakan bagian dokumen yang berhubungan dengan strategi meningkatkan partisipasi masyarakat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Way Kanan.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah (2012: 158), analisis data merupakan tahap pertengahan dari serangkaian tahap dalam sebuah penelitian yang mempunyai fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Pada dasarnya, semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melewati prosedur pengumpulan data, *input* data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan diakhiri dengan penulisan hasil temuan dalam bentuk narasi.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah Model Interaktif menurut Miles dan Huberman (Herdiansyah, 2012:164) adapun penjelasan dari teknik analisis data Model Interaktif menurut Miles dan Huberman terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. Idealnya, proses pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau draft. Bahkan, Creswell (Herdiansyah, 2012: 164) menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya sudah berfikir dan melakukan analisis ketika penelitian kualitatif baru dimulai. Dalam pengumpulan data ini tidak ada waktu yang spesifik dan khusus yang disediakan untuk proses pengumpulan data karena sepanjang penelitian berlangsung, sepanjang itu pula proses pengumpulan data dilakukan.

Sebagai langkah awal proses pembuatan draft, sedikit demi sedikit peneliti sudah melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Dimana peneliti sudah melakukan studi *pre-eliminatory* yang berfungsi untuk verifikasi dan pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti benar-benar ada di kantor KPU Way Kanan maupun data pendukung lainnya .

2. Reduksi Data

Reduksi data secara inti dijelaskan Herdiansyah (2012: 165), yaitu proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (*sript*) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasil observasi, hasil

studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (*script*) sesuai dengan formatnya masing-masing.

Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di KPU Way Kanan yaitu menjadikan bentuk tulisan dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi sebagai bentuk upaya penyusunan proses dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

3. *Display Data*

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorikan. Selanjutnya, akan memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan sub tema yang diakhiri dengan memberikan kode (*coding*) dari subtema sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Dalam hal ini sub tema yang di angkat oleh peneliti yaitu mengenai strategi yang dilakukan oleh KPU Way Kanan, dari subtema ini peneliti bisa memfokuskan penelitian dengan tidak membahas bahasan secara melebar.

4. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013: 85). Kesimpulan pada penelitian kualitatif ini menjurus pada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkap "*what*" dan "*how*" dari temuan penelitian tersebut.

Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian pada apa yang akan diteliti maka yang peneliti lakukan adalah menyimpulkan hasil riset pada akhir pembahasan tersebut. Dimana kesimpulan yang diberikan oleh peneliti merupakan kesimpulan yang dilakukan setelah melakukan analisis terlebih dahulu sebelumnya.

F. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data merupakan validitas dari data yang diperoleh. Menurut Moleong (2011: 324) megemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria :

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

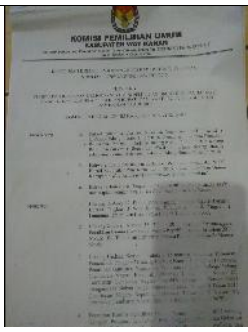
a. Triangulation

Menurut Moleong (2011: 330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain. Menurut Denzin dalam Moleong (2011: 330) ada empat macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek baik drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa teknik pengumpulan data, dan sumber data dengan metode yang sama. Triangulasi

penyidik, dilakukan dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lain.

Adapun yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber:

Tabel 5. Contoh Tabel Triangulasi Strategi KPU Kabupaten Way Kanan

No	Informan	Wawancara	Dokumentasi	Keterangan
1.	Erwan Bustami selaku Komisioner KPU Kabupaten Way Kanan	“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula yaitu dengan mengadakan berbagai macam strategi diantaranya membentuk relawan demokrasi, KPU <i>goes to school</i> , Pemilos dan persami.”		Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui indikator pelaksanaan strategi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan berjalan dengan baik dan dengan informan yang sudah tepat sasaran.

Sumber: diolah peneliti 2016

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial yaitu dengan memanfaatkan bahan-bahan tercatat atau terekam sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini peneliti lakukan dengan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis dan penafsiran data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku tentang evaluasi strategi, dan partisipasi masyarakat,

catatan penelitian, dokumentasi foto-foto dan rekaman wawancara peneliti dilapangan.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan “uraian rinci”, yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesempatan konteks antara pengirim dan penerima. Upaya untuk memenuhi hal tersebut, peneliti melakukannya melalui tabel data yang disajikan oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian kelapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka peneliti selalu mendiskusikannya dengan dosen pembimbing.

4. Kepastian Data

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif hampir sama dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dilakukan peneliti dengan mendiskusikannya kepada dosen pembimbing dan dosen pembahas. Menguji

kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar kepastian.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan

1. Sejarah singkat KPU Way Kanan

Pemilu 1955 Ini merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih

anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante. Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkisaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal :

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi. Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu.

Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian

UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya. Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Tabel 6. Hasil Pemilu 1955 untuk Anggota DPR.

No.	Partai>Nama Daftar	Suara	%	Kursi
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6

8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	2
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indoonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Sumber : KPU Kabupaten Way Kanan 2016

2. Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Tugas dan Wewenang

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

- 1) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- 2) Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;
- 3) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- 4) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;
- 5) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II;
- 6) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
- 7) Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf: Tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

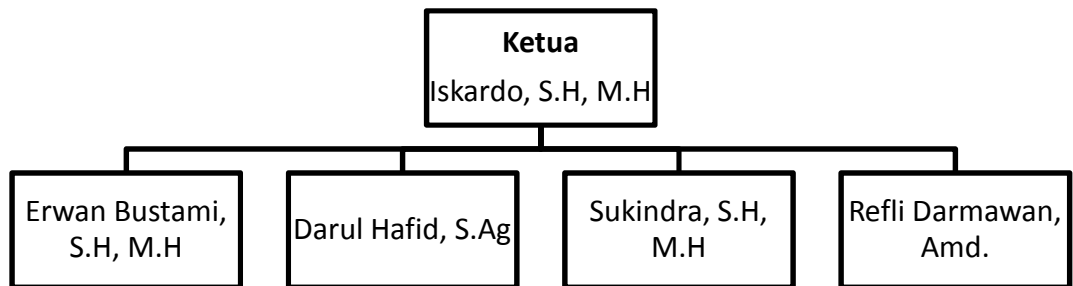
4. Kelembagaan KPU Kabupaten Way Kanan

KPU Kabupaten Way Kanan terdiri dari 2 unsur yaitu komisioner dan kesekretariatan. Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan dimana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekretariat membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. Rincian kedua unsur ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Unsur Komisioner

Komisioner KPU yang terdiri dari 5 orang yang dikoordinasi oleh satu orang ketua dan empat orang anggota. Untuk komisioner KPU Way Kanan periode 2014 – 2019 disahkan melalui pengambilan sumpah anggota Tanggal 17 November 2014. Komisioner periode 2014 – 2019 terdiri dari Iskardo, S.H, M.H , Erwan Bustami, S.H, M.H , Darul Hafid, S.Ag , Sukindra, M.H , Refli Darmawan, Amd. Struktur komisaris Way Kanan ini dapat dilihat melalui gambar berikut :

Gambar 3. Struktural Organisasi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan



Sumber :Dokumen profil KPU Way Kanan

b. Unsur Kesekretariatan

Unsur kesekretariatan dipimpin oleh sekretaris KPU Way Kanan yaitu Drs. Marson M.M. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Way Kanan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Program, Data dan SDM;
2. Sub Bagian Keuangan Umum, dan Logistik;
3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara, dan Humas;
4. Sub Bagian Hukum.

c. Pembagian Tugas

Pembagian tugas yang terdiri dari 5 komisioner yang merupakan koordinator pengarah dari divisi-divisi yang ada.

- a. Divisi sosialisasi
- b. Divisi hubungan antar lembaga
- c. Divisi teknis
- d. Divisi kampanye
- e. Divisi anggaran dan logistik

Dan dari setiap divisi ini kemudian dipecah lagi menjadi kelompok kerja (pokja),

- a) Erwan bustami
 - 1. Pokja rekrutmen penyelenggara
 - 2. Pokja sosialisasi
 - 3. Pokja pemungutan dan penghitungan suara
- b) sukindra
 - 4. Pokja pencalonan
 - 5. Pokja Kampanye
- c) karun
 - 6. Pokja logistik
 - 7. Pokja audit dana kampanye
- d) Refki darmawan
 - 8. Kampanye pemutakhiran mata pilih
 - Ketuanya tentang pokja hubungan antar lembaga

Berikut merupakan tabel data pemilih tetap pilkada 2015 yang telah direkapitulasi oleh KPU Provinsi Lampung.

Tabel 7. Data Pemilih Tetap Pilkada 2015

Kabupaten/Kota	Data Pemilih Tetap Pilkada 2015							
	Jml. TPS	Jumlah Pemilih				Jumlah Pemilih Pemula		
		L	P	Kosong	Total	L	P	Total (%)
1. KOTA BANDAR LAMPUNG	1.3	316.357	314.009	0	630.366	5.922	5.653	11.575 (1,84)
2. KOTA METRO	238	55.876	56.946	0	112.822	1.19	1.124	2.314 (2,05)
3. LAMPUNG SELATAN	1.737	372.782	354.903	0	727.685	6.992	6.8	13.792 (1,90)
4. LAMPUNG TENGAH	2.411	501.452	479.617	0	981.069	6.523	6.43	12.953 (1,32)
5. LAMPUNG TIMUR	1.621	403.764	390.872	0	794.636	6.322	6.23	12.552 (1,58)
6. PESAWARAN	925	169.785	161.872	0	331.657	2.589	2.337	4.926 (1,49)
7. PESISIR BARAT	282	57.11	52.273	0	109.383	824	815	1.639 (1,50)
8. WAY KANAN	780	172.38	164.762	0	337.142	2.344	2.549	4.893 (1,45)
TOTAL	9.294	2.049.506	1.975.254	0	4.024.760	32.706	31.938	64.644 (1,61)

Keterangan Difabel : 1 Tuna Daksa, 2 Tuna Netra, 3 Tuna Rungu/Wicara, 4 Tuna Gra
sumber: kpu.go.id

5. Tupoksi KPU Kabupaten Way Kanan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)

Dalam melakukan penetapan DPT, KPU Kabupaten Way Kanan, PPK, PPS dan PPDP melakukan pembagian dan tugas pengorganisasian sebagai berikut:

a. KPU Kabupaten Way Kanan

KPU Kabupaten Way Kanan menyiapkan bimtek untuk PPK, PPS dan PPDP. KPU Kabupaten Way Kanan menerima data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), melakukan pengecekan dan penyusunan daftar pilih berdasarkan pengelompokan tiap kecamatan dan desa/kelurahan, dan menyerahkan daftar pemilih kepada PPS melalui PPK, serta menerima dan mengkoordinasikan dan melakukan pengecekan DPT dari PPS melalui PPK.

b. PPK

PPK membantu PPS dalam melakukan sosialisasi pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan. Menerima data pemilih per TPS (Model A.0-KWK) dan seluruh alat perlengkapan pemutakhiran data pemilih dari KPU Kabupaten Way Kanan ketika dilaksanakan bimtek untuk diserahkan kepada PPS dan Pantarlih. Melakukan bimtek atau pelatihan pemutakhiran data pemilih bagi PPS dan Pantarlih di wilayah kerja PPK. Kemudian PPK menerima daftar pemilih dari KPU, menyampaikan daftar pemilih kepada PPDP melalui PPS, menerima, mengkoordinasikan, dan menyerahkan DPS dan DPSHP kepada KPU Kabupaten Way Kanan.

c. PPS dan PPDP

Kewenangan PPS dalam proses pemutakhiran data pemilih sangat besar, mulai dari entry data, memperbaiki data pemilih (menghapus, menambah, dan memperbaiki), mengumumkan daftar pemilih kepada masyarakat. Pelaksanaan pemilu di atasnya (PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU) tidak memiliki kewenangan melakukan perubahan data pemilih tanpa usulan dan persetujuan PPS. Oleh karena itu, PPS menjadi ujung tombak kedua bagi KPU, setelah PPDP, yang langsung berhubungan dengan pemilih. Oleh karena itu PPS memiliki pengetahuan dan kedekatan dengan warga/pemilih.

PPS melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan dan masyarakat luas (misalnya membuat surat edaran, melakukan rapat koordinasi dengan RT/RW, pengumuman di tempat ibadah, pertemuan warga dan sebagainya). Lalu, memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dibentuk. Bersama-sama PPDP mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK. Memastikan telah menerima data pemilih per TPS (Model A-KWK) beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih telah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

PPS juga menyerahkan data pemilih per TPS (Model A-KWK) dan dokumen pemutakhiran data pemilih kepada masing-masing Pantarlih; dan melakukan koordinasi terakhir dengan PPDP mengenai SOP khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftarkan pemilih baru, cara mengisi masing-masing formulir, dan tenggat waktu yang harus diselesaikan, paling

lambat 1 hari sebelum dilaksanakan verifikasi untuk mengecek kesiapan dan pemahaman PPDP.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Strategi penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilihan umum kepala daerah 2015 terkategori sebagai strategi *sukses* yang merupakan hasil yang paling diidamkan-idamkan oleh setiap organisasi. Situasi ini dapat terjadi jika formulasi strategi perusahaan disusun dengan baik begitu juga dalam implementasinya. Adapun upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan meliputi (1) Membentuk relawan demokrasi, (2) KPU *goes to school*, (3) PEMILOS (pemilihan langsung osis), (4) PERSAMI (Perkemahan Pramuka Sabtu Malam Minggu).
2. Faktor penghambat dan pendukung penyelenggara pemilu dalam menjalankan strategi
 - 1) Dari strategi yang telah dilakukan tersebut, terdapat faktor pendukung didalamnya yaitu:
 - a. Jumlah pemilih pemula yang selalu bertambah setiap tahunnya;

- b. Pembagian tugas dan fungsi yang jelas oleh KPU Kabupaten Way Kanan;
- c. Pengadaan fasilitas yang cukup memadai;
- d. Terdapat organisasi pemuda yang ikut serta dalam mensukseskan program pemilih cerdas pemilih berkualitas.

2) Meskipun telah adanya strategi-strategi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan, terdapat faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di kabupaten Way Kanan meliputi :

- a. Penganggaran yang berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang menggunakan sistem tahapan karena masih terkontaminasi oleh kepentingan politik lokal di daerah.
- b. Sosialisasi pendidikan pemilih yang kurang maksimal karena kurangnya kesadaran pemilih menggunakan suaranya pada hari pemungutan suara di TPS.
- c. Pelaksanaan sosialisasi yang hanya batas Kecamatan saja tidak sampai ke Desa atau RT.
- d. Belum melibatkan organisasi kemasyarakatan yang berpotensi terhadap pemilih pemula yang tidak lagi bersekolah.
- e. Kurang akuratnya data pemilih karena masih berbasis DPT pemilu atau pilkada terakhir bukan dari DP4 pemerintahan yang digunakan.
- f. Pemilih yang pasif dalam pemutakhiran data pemilih tidak aktif memastikan dirinya terdata atau tidak dalam DPT.

- g. Banyaknya pemilih yang berada di luar daerah Way Kanan pada saat pemilihan berlangsung karena sedang bekerja dan bersekolah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran atau masukan dari peneliti sebagai sumbangan pemikiran untuk perbaikan selanjutnya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan sebaiknya menyusun dan mensinkronisasikan DPT yang sesuai dengan kondisi dan domisili penduduk. Hal ini dalam rangka mengurangi rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang disebabkan oleh masalah teknis dan administrasi;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan sebaiknya mengusulkan anggaran pilkada dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah dan menjelaskan regulasi sehingga terhindar dari kepentingan politik di daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan sebaiknya melakukan sosialisasi terhadap pemilih sampai dengan tingkat Desa atau RT tidak hanya sebatas kecamatan saja;
4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan sebaiknya lebih maksimal dalam melakukan sosialisasi akar rumput pemilih terlebih ditempat – tempat yang masih terbelang pedalaman;
5. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan sebaiknya bekerjasama dengan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang berpotensi terhadap pemilih pemula terkhusus bagi pemilih yang tidak lagi bersekolah seperti karang taruna, PKK;

6. Pemilih pemula sebaiknya lebih di prioritaskan lagi terlebih pemilih pemula yang berada di luar daerah Way Kanan seperti contoh diberikan fasilitas khusus dalam memilih diluar daerah;
7. Pemilih pemula dan masyarakat sebaiknya tidak pasif dalam pemutahiran mata pilih dan harus aktif memastikan dirinya terdaftar dalam DPT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akdon. 2006. *Strategic Management For Educational Management (manajemen strategik untuk manajemen pendidikan)*. Alfabeta: Bandung.

_____. 2011. *Strategic Management For Educational Management*. Alfabeta: Bandung

Amir, Taufiq. 2011. *Manajemen Strategik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Amirullah dan Budiyo, Haris. 2004. *Pengantar Manajemen*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

Bryson, Jhon.M. 2000. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam, 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Ikrar Mandirabadi: Jakarta.

_____, 2008. edisi revisi *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

David, Fred R. 2005. *Manajemen Strategis*. Salemba Empat: Jakarta.

Dirgantoro, Crown. 2001. *Manajemen Strategik : Contoh, Kasus, dan Implementasi*. Grasindo: Jakarta

Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Glueck, William F dan Jauch, Lawrence R. 1994. *Manajemen strategis dan Kebijakan Perusahaan*. Erlangga: Jakarta.

Heene, Aime dkk. 2010. *Manajemen Strategi Keorganisasian Publik*. Bandung. PT Refika Aditama

Herdiansyah, Haris. 2012. *Metodologi Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*. Salemba Humanika. Jakarta

- Madjowa, Verrianto dkk. 2015. *Modul Open Data Pemilu*. Jakarta. Perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi
- Moleong, Lexy. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya. Bandung
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah*. Bayu Media Publishing. Malang
- Nawawi, Hadari. 2012. *Manajemen Strtategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan (Dengan ilustrasi di bidang pendidikan)*. Gadjah Mada University Press
- Nugroho, Eko. 2008. *Partisipasi Masyarakat Desa*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Robbins, Stephen. 2010. *Prilaku Organisasi*. Prehalindo: Jakarta
- Soeharno, S.Pd.,M.Si. 2004. *Diktat Kuliah Sosiologi Politik*. DIKTAT.
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik (Untuk organisasi publik dan organisasi non profit)*. Grasindo: Jakarta.
- _____. 2008. *Pengambilan Keputusan Stratejik (Untuk organisasi publik dan organisasi non profit)*. PT. Gramedia Widiasarana: Jakarta.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Manajemen Strategik*. PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Tim Eska Media. 2002, *EdisiLengkap UUD 1945*.Eska Media: Jakarta.
- _____, 2001. *Strategic Management in Action*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Lampung: Lampung.
- Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Widjaya, Amin T. 2009. *Manajemen Strategi*. Harvarindo: Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal 1

UU Nomor Tahun 2012 pasal 1 tentang Pemilu legislatif.

Undang-undang Politik. 2003. UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Sumber lainnya

www.kpuri.go.id

www.kpu-waykanan.go.id

<http://fardinlaia.blogspot.co.id/2014/06/strategi-kpu-dalam-pemilu.html> diakses pada Hari Kamis, 10 September 2015. Pukul 10.00 WIB

<http://armandjexo.blogspot.co.id/2011/10/manajemen-strategik-analisis-lingkungan.html> diakses pada Hari Kamis, 10 September 2015. Pukul 10.00 WIB

<http://www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-pemilihan-umum-tujuan-fungsi.html#> diakses pada Hari Kamis, 10 September 2015. Pukul 10.00 WIB